



**Rencana Strategis
Sekretariat
Daerah Aceh
Tahun 2017-2022**

**Sekretariat Daerah Aceh
Tahun 2018**

KATA PENGANTAR

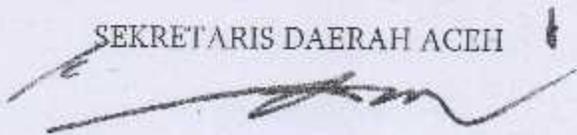
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan dan rahmatnya rencana Strategi Sekretariat Daerah Aceh (Renstra) tahun 2017-2022 telah selesai di disusun dalam bentuk dokumen. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 merupakan suatu kewajiban bagi Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang pedoman Penyusunannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), dalam mendorong pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Priode 2017-2022, namun demikian dalam penyusunan dan penetapan dokumen Renstra ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan.

Demikian, kiranya Renstra Sekretariat Daerah ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh. Terima kasih.

Banda Aceh, Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH ACEH


Drs. DERMAWAN, MM

PEMBINA UTAMA

NIP. 19590126 198303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung yang telah dilaksanakan secara langsung dan demokratis memunculkan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa Visi dan Misi Pemerintah Aceh yang menjadi landasan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 5 (lima) tahunan yang kemudian dijabarkan ke dalam Perencanaan strategis (Renstra) SKPA.

Sekretariat Daerah Aceh yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Aceh yang wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) 2017-2022 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor.....tahun 2017 tentang.....sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Aceh tahun 2017-2022 dilakukan secara simultan yang bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022, penyusunan ini melalui proses tahapan persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan renstra Sekretariat Daerah Aceh.

Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2017-2022 yang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah yang disusun untuk mendukung pencapaian RPJMA yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 . Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Stgrategi Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;
9. Qanun Aceh Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Aceh adalah:

1. Untuk keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Rencana Strategi Pemerintah Aceh dengan Sekretariat Daerah Aceh, sehingga bermanfaat bagi Sekretariat daerah Aceh dalam proses perencanaan dan penganggaran.
2. Menjadi acuan dalam Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK).
3. Memudahkan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam mencapai tujuan dengan cara penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Renstra Biro dilingkungan Setda Aceh

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

membahas secara ringkas Pengertian Renstra Sekretariat Daerah Aceh, Fungsi Renstra Sekretariat Daerah Aceh, proses penyusunan renstra

Sekretariat Daerah Aceh, keterkaitan Renstra sekretariat Daerah Aceh dengan RPJMD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Pada Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, Sumber Daya Sekretariat Daerah Aceh, Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai indentifikasi pemasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Memuat penjelasan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat penjelasan tentang rencana program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA TAHUN 2017-2022

Memuat tentang Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA tahun 2017-2022, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Aceh dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMA.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Sekretaris Daerah Aceh merupakan unsur staf Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian tugas perangkat Aceh;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negera pada perangkat Aceh;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Aceh merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat masing-masing asisten membawahi 9 (sembilan) Biro-Biro setiap Biro membawahi 3(tiga) Bagian dengan, masing-masing bagian membawahi 3 (tiga) sub bagian.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, Sekretaris Daerah Aceh secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur, yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dan
- c. Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama.

Secara rinci Susunan Organisasi Sekretariat daerah Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. **Sekretaris Daerah**, membawahi :

2. **Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh**, terdiri dari:

a. Biro Tata Pemerintahan, membawahi:

1) Bagian Penataan Daerah dan Perangkat Pemerintahan, terdiri dari:

- (a) Subbag Penataan Daerah, Mukim dan Gampong
- (b) Subbag Perangkat Pemerintahan dan Hubungan antar Lembaga, dan
- (c) Subbag Pemilu dan Pemilihan.

2) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- (a) Subbag Ketentraman dan Ketertiban, kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- (b) Subbag Perbatasan Negara dan Pertanahan; dan
- (c) Subbag Perbatasan Daerah dan Toponimi

3) Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari:

- (a) Subbag Tata Usaha dan Administrasi Pemerintahan Daerah;
- (b) Subbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- (c) Subbag Pengembangan dan Evaluasi Otonomi Daerah.

b. Biro Hukum, membawahi:

- 1) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
 - (a) Subbag Fasilitasi dan Konsultasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota
 - (b) Subbag Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - (c) Subbag Sikronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota.
- 2) Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, terdiri dari:
 - (a) Subbag Bantuan Hukum;
 - (b) Subbag Penyelesaian Sengketa Hukum;
 - (c) Subbag Naskah Kerjasama dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
- 3) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha
 - (b) Subbag Qanun Aceh dan Sosialisasi Produk Hukum; dan
 - (c) Subbag Peraturan dan Keputusan Gubernur.

c. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari:
 - (a) Subbag Urusan Haji dan Pembinaan Keagamaan;
 - (b) Subbag Kerjasama Ulama dan Umara; dan
 - (c) Subbag Pembinaan Kelembagaan dan Pengkajian Kerukunan Umat Beragama.
- 2) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - (a) Subbag Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;
 - (b) Subbag Pembinaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - (c) Subbag Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.
- 3) Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Sosial, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha, Program dan Perencanaan;

- (b) Subbag Pembinaan Kesejahteraan Sosial; dan
- (c) Subbag Pembinaan Kesehatan, Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

b. Biro Perekonomian, membawahi :

- 1) Bagian Pembinaan Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - (a) Subbag Pertanian;
 - (b) Subbag Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - (c) Subbag Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 2) Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, ESDM dan Pariwisata, terdiri dari:
 - (a) Subbag Industri dan Perdagangan;
 - (b) Subbag Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
 - (c) Subbag Transportasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3) Bagian Administrasi Sarana Perekonomian, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Kelembagaan, Perekonomian dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - (c) Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Aceh.

c. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

- 1) Bagian Pembinaan Administrasi Infrastruktur dan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - (a) Subbag Administrasi Pembangunan Infrastruktur;
 - (b) Subbag Administrasi Pemukiman dan Kawasan; dan
 - (c) Subbag Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 2) Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - (a) Subbag Administrasi Pembangunan Provinsi;

- (b) Subbag Adminstrasi Pembangunan Kab/Kota; dan
 - (c) Subbag Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Pembantuan.
- 3) Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Monitoring dan Evaluasi, dan
 - (c) Subbag Pengendalian Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan.

d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- 1) Bagian Pemilihan Penyediaan, terdiri dari:
- (a) Subbag Konstruksi dan Konsultansi;
 - (b) Subbag Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya; dan
 - (c) Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari;
- (a) Subbag Pengembangan Kebijakan Pengadaan;
 - (b) Subbag Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik; dan
 - (c) Subbag Layanan Pengguna
- 3) Bagian Advokasi Hukum dan Kerjasama, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Fasilitasi dan Advokasi Hukum; dan
 - (c) Subbag Kerjasama Layanan Pengadaan.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a. Biro Organisasi, terdiri dari :

- 1) Bagian Kelembagaan, terdiri dari:
- (a) Subbag Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi
 - (b) Subbag Kelembagaan Perangkat Kab/kota, dan
 - (c) Subbag Analisa dan Formasi Jabatan.
- 2) Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, terdiri dari:
- (a) Subbag Kepegawaian;

- (b) Subbag Perencanaan Strategis dan Kinerja;
 - (c) Subbag Evaluasi dan Pelaporan SAKIP.
- 3) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Tata Laksana Pemerintahan; dan
 - (c) Subbag Pelayanan Publik dan Perpustakaan.

b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:

- 1) Bagian Humas dan Media Masa, terdiri dari
- (a) Subbag Peliputan, Hubungan dan Media Masa.
 - (b) Subbag Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan
 - (c) Subbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center.
- 2) Bagian Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Analisis, terdiri dari:
- (a) Subbag Naskah dan Makalah Pimpinan
 - (b) Subbag Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - (c) Subbag Publikasi dan Analisis.
- 3) Bagian Protokol, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Tamu, dan
 - (c) Subbag Protokol dan Acara

c. Biro Umum, membawahi:

- 1) Bagian Tata Usaha Keuangan, terdiri dari:
- (a) Subbag Administrasi Keuangan;
 - (b) Subbag Program dan Keuangan Pimpinan, dan
 - (c) Subbag Pelaporan dan Akuntansi.
- 2) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:
- (a) Subbag Rumah Tangga Pimpinan;
 - (b) Subbag Rumah Tangga Sekretariat, dan
 - (c) Subbag Administrasi Aset Sekretariat Daerah.
- 3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- (a) Subbag Tata Usaha Biro
- (b) Subbag Pengelolaan Naskah Dinas;
- (c) Subbag Tata Usaha Pimpinan, dan
- (d) Subbag Fasilitasi Adminitrasi Staf Ahli Gubernur.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
			L	P	I	II	III	IV	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	10	11	12	13	14
1	Sekretaris Daerah	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2	Asisten	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1
3	Staf Ahli Gubernur	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
4	Biro Administrasi Pembangunan	28	19	9	-	2	21	5	-	3	1	16	8	-
5	Biro Hukum	30	20	10	-	1	24	5	-	3	-	16	10	1
6	Biro Humas dan Protokol	52	40	12	-	16	31	5	1	13	3	23	12	-
7	Biro Keistimewaan dan Kesra	66	29	37	-	11	51	4	-	15	6	34	11	-
8	Biro Organisasi	60	39	21	-	20	35	5	2	16	6	23	13	-
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	18	17	1	-	2	13	3	-	2	-	9	7	-
10	Biro Perencanaan	43	25	18	-	4	33	6	-	4	2	25	12	-
11	Tata Biro Pemerintahan	36	24	12	-	4	28	4	1	6	2	16	11	-
12	Biro Umum	242	188	54	16	135	90	3	29	124	10	69	10	-
13	Unit Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	25	10	15	3	7	15	-	5	9	4	7	-	-
14	Pelaksana Setda Aceh	58	52	6	-	-	9	47	-	1	1	25	30	1
	Total	665	470	195	19	201	350	94	38	196	35	265	128	3

Sumber Data : *Bagian Kepegawaian Biro Organisasi, Maret 2017*

Dari tabel 1.2 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun

demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 470 orang atau 70,6%, apabila dibandingkan dengan pegawai perempuan yang berjumlah 195 orang atau 29,3%.

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 350 PNS atau sebesar 52,63%, golongan II sebanyak 201 PNS atau sebesar 30,22%, golongan IV sebanyak 94 PNS atau sebesar 14,13% dan golongan I sebanyak 19 PNS atau sebesar 2,85%.

Berdasarkan, tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah Aceh didominasi tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 265 orang atau 39,84%, tingkat SLTA sebanyak 190 orang atau 29,47%, pendidikan Strata 1 sebanyak 128

orang atau 19,24%, tingkat SLTP sebanyak 38 orang atau 5,7%, Tingkat Diploma 35 orang atau 5,26%, sedangkan tingkat pendidikan Strata 3 merupakan tingkat pendidikan paling minim, yaitu sebanyak 3 orang atau 0,45%.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, **lembaga teknis daerah dan lembaga daerah**. Selama tahun anggaran 2012-2017 digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah Aceh, secara sederhana dapat di disampaikan sebagaimana tabel....berikut... (TABEL indikator yang ada LAKIP atau PK)

2.4 Tantangan dan Peluang

Berkaitan dengan hasil kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk

Kabupaten/kota), hasil telaahaan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun yang akan datang, di Sekretariat Daerah Aceh tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota, namun demikian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH ACEH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Aceh dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsi Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh Senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, baik kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan Pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal Organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan Internal Organisasi terdiri dari 2 (dua) faktor Strategis yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), Lingkungan Eksternal Organisasi terdiri dari 2 (dua) faktor Strategis yaitu Peluang (Opportunity) dan Ancaman/tantangan (threath).

Identifikasi lingkungan strategis organisasi Sekretariat Daerah Aceh, berupa faktor-faktor strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (Strength)

- a. **(Dibidang HUKUM)** Tersedianya aturan yang jelas terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh.
- b. Tersedianya aturan yang jelas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- c. **(Dibidang Anggaran)** Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Belum Optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- c. Masih adanya Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh tumpang tindih dengan Tugas dan Fungsi SKPA
- d. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh yang belum mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja.
- e. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat yang belum optimal.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

- a. Dengan Kuantitas Sumber Daya Aparatur pekerjaan dapat dengan lancar dan mudah diselesaikan.
- b. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
- c. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan good governance;
- d. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

2. Ancaman/tantangan (Threat)

- 1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih banyak;
- 2. Masih ada Penjabat/ Staf yang tidak bisa mengoperasikan IT
- 3. Perlunya pengembangan dan pembinaan Tim kerja yang solid
- 4. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;
- 5. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
- 6. Kuantitas tenaga kontrak dilingkungan Setda Aceh yang banyak;
- 7. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
- 8. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
- 9. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
- 10. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2017-2022 mengacu kepada visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, (RPJMA) Tahun 2017-2022,. Pemerintah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah menetapkan **Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022** yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

a. Visi

Visi Pemerintah Aceh, yaitu **”Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”**

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut:

1. Aceh yang damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.
2. Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.
3. Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tatakelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Aceh menetapkan misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

c. Program Prioritas

Dalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akan menjalankan 15 program unggulan sebagai berikut:

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi:

- a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;
- b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;
- c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan);
- d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. Aceh Careng

Anak Aceh cerdas (careng) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas. Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan tersebut antara lain:

- a. Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;
- b. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah;
- c. Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil;

- d. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh;
- e. Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
- f. Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat internasional dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan *Master Plan* Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi (validasi data primer dan rencana pengembangan);
- b. Penerapan *Public Private Partnership* untuk utilisasi sumber daya energi skala menengah dan besarnya panas bumi dan tenaga air tanpa menggunakan hutang luar negeri;
- c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;
- d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas menengah;
- e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.
- f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.

5. Aceh Meugô dan Meulaot

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
- b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
- c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
- d. Kemandirian rantai pasok (*supply chain*) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
- e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Aceh TroÃ

Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui:

- a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan;
- b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;
- c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga;
- d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. Aceh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal;
- b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;
- c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa;

8. Aceh Kaya

Merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda;
- b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur;
- c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda.

9. Aceh Peumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;

- a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja
- b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
- c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

10. Aceh Damai

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;

- a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai;
- b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;

- d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

11. Aceh Meudadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;

- a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan;
- b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial;
- c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai keislaman;
- d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat di setiap tingkatan.

12. Aceh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;

- a. Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh
- b. Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan;
- d. Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul.

13. Aceh Green

Menegaskan kembali pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

- d. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;

- e. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat
- g. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
- h. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

14. Aceh Seuninya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda. Pendekatan program ini dilakukan melalui:

- a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara bertahap;
- b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu;

15. Aceh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;

Berdasarkan visi, misi dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), maka Sekretariat Daerah Aceh mengacu kepada misi Gubernur yang pertama yaitu : ***”Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan”***. Berdasarkan misi dimaksud, Sekretariat daerah Aceh menetapkan visi yaitu: **”mewujudkan fungsi koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien”** dan

”meningkatkan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel”.

Tabel 3.1.

Visi, Misi Gubernur yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat daerah Aceh.

Visi :				
” Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”.				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan pelayanan Setda Aceh	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1 : Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;			
2.	Program: Peningkatan Sumber Daya Aparatur. dengan Kegiatan yang berhubungan langsung Dengan Misi 1. 1. Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh belum optimal;	Antusias SKPA maupun Pemerintahan Kab/kota belum maksimal	Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

3.4 Telaahan Renstra Provinsi

3.5 Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Aceh,. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh belum optimal;
2. Organisasi perangkat Aceh belum tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*);
3. Sistem dan prosedur kerja birokrasi belum efektif dan efisien;
4. Inkonsistensi dalam penetapan peraturan perundang-undangan;
5. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi;
6. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal;
7. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
8. Sistem penilaian kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

1.1. Visi dan Misi

Sebelum ditetapkan RPJMA Tahun 2017-2022 Visi Sekretariat Daerah Aceh masih mengacu pada visi dan misi Pemerintah Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMA Tahun 2012-2017, Sekretariat Daerah Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan visi dalam perencanaan strategis sebagai berikut :
”Profesional dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah”

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan fungsi koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat Daerah Aceh.
4. Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintah Aceh, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan pembinaan sosial, hukum, keagamaan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan pelayanan Administrasi umum, penataan aset dan pelayanan informasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum, pelayanan, informasi dan komunikasi kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur;
4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja;
5. Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Aceh bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pemerintah Aceh;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Aceh.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Setda;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah Aceh;
7. Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur;
8. Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Aceh;
9. Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
10. Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Aceh dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi;
11. Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata;
12. Meningkatnya Pengendalian terhadap Penggunaan Anggaran;
13. Meningkatnya tertib pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Tata Ruang;
14. Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama;
15. Terwujudnya tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintahan Aceh;
17. Meningkatnya Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Sekretariat Daerah Aceh menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Aceh sesuai dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang amanah;
2. Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien dalam penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Meningkatkan hubungan kerja baik secara vertikal, horizontal dan diagonal;
4. Pengembangan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*);
5. Peningkatan etos dan disiplin sumber daya aparatur;
6. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergisitas program pembangunan perekonomian Aceh;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui koordinasi program pembangunan ekonomi yang proporsional, adil/merata, terintegrasi dan berkelanjutan;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perekonomian dalam rangka percepatan dan kesinambungan pembangunan perekonomian Aceh;

10. Menyediakan data dan informasi untuk kebijakan di bidang perekonomian Aceh;
11. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (RAKORPIMDA);
12. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya Mukim dan Gampong dalam tata kelola pemerintahan;
13. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota;
14. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil;
15. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan PEMILU dan PEMILUKADA
16. Memfasilitasi terbentuknya PP dan Qanun sebagai implementasi MoU Helsinki dan UUPA;
17. Fasilitasi penyelesaian proses ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan dan tapal batas untuk meminimalisasi konflik atau sengketa pertanahan/perbatasan;
18. Fasilitasi penyelesaian sengketa dan bantuan hukum untuk Pemerintah Aceh dan masyarakat;
19. Fasilitasi dan sinkronisasi produk hukum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai upaya atau cara yang menjadi faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi meliputi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian kebijakan. Adapun Kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pemberian advis kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh;
2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Aceh;
4. Penataan kelembagaan perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

5. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta meningkatkan sistem pencapaian kinerja;
6. Pengembangan hubungan kerja baik secara horizontal dan vertikal serta diagonal antara pemerintah dan masyarakat secara interaktif dan sejajar.
7. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penciptaan pemerintah yang baik.
8. Menyusun perencanaan dan koordinasi pembinaan/pengembangan kelembagaan usaha perekonomian Aceh;
9. Mendorong kemandirian dunia usaha dan koordinasi pembinaan/pengembangan kelembagaan dunia usaha;
10. Meningkatkan koordinasi pembinaan/pengembangan komoditi unggulan daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan sumber daya dan potensi daerah;
12. Menumbuhkembangkan produktivitas, daya saing perindustrian, perdagangan dan pertambangan berbasis lingkungan hidup;
13. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri;
14. Memfasilitasi optimalisasi terjadinya kemitraan dan kemandirian usaha industri kecil, rumah tangga, koperasi dan UKM;
15. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi hubungan masyarakat, kelembagaan dan media massa;
16. Penyiapan bahan naskah-naskah kehumasan, penerbitan, media center dan dokumentasi;
17. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesekretariatan;
18. Pengaturan tugas-tugas pimpinan dan urusan rumah tangga;
19. Perumusan teknis dan pengaturan di bidang rumah tangga sekretariat;
20. Penyediaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
21. Penataan dan pengelolaan tertib administrasi kearsipan kesekretariatan;

22. Penertiban dan pengamanan rumah tangga pimpinan dan lingkungan Sekretariat Daerah Aceh;
23. Pengamanan berita sandi dan Kelancaran pelayanan telekomunikasi;
24. Tertib Akuntabilitas keuangan dan asset di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh;
25. Tertib administrasi keuangan dan asset sebagai landasan azas akuntabilitas.
26. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong;
27. Meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
29. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

2.4 Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

1.

2.5 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil S(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat pada table 6.1 yang menjadi lampiran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA TAHUN 2017-2022

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Aceh ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran program dan kegiatan. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang akan digunakan selama 5 (lima) tahun ke depan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2017-2022 adapun indikator-indikator kinerja Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 lampiran.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 – 2022 yang merupakan dokumen penting dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yang mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan (Renja) untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Aceh, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang disusun, dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansinya mencerminkan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai.

B. Saran

Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2012-2017 dapat dijadikan acuan untuk Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilaksanakan secara langsung dan demokratis memunculkan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa Visi dan Misi Pemerintah Aceh yang menjadi landasan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 5 (lima) tahunan yang kemudian dijabarkan ke dalam Perencanaan strategis (Renstra) SKPA.

Sekretariat Daerah Aceh yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Aceh yang wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) 2017-2022 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Aceh tahun 2017-2022 dilakukan secara simultan yang bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022, penyusunan ini melalui proses tahapan persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan renstra Sekretariat Daerah Aceh.

Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2017-2022 mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah yang disusun untuk mendukung pencapaian RPJMA yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Aceh adalah:

1. Menjadi acuan dalam Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK).

2. Memudahkan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam mencapai tujuan dengan cara penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Renstra Biro dilingkungan Setda Aceh

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan, serta sistematikan penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Pada Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Aceh, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L

dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Aceh
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Aceh.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA.
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Sekretaris Daerah Aceh merupakan unsur staf Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian tugas perangkat Aceh;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negera pada perangkat Aceh;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Aceh merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat masing-masing asisten membawahi 3 (tiga) Biro, setiap Biro membawahi 3 (tiga) Bagian dengan, masing-masing bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, Sekretaris Daerah Aceh secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur, yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dan
- c. Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama.

Secara rinci Susunan Organisasi Sekretariat daerah Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. **Sekretaris Daerah**, membawahi :
2. **Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh**, terdiri dari:
 - a. **Biro Tata Pemerintahan, membawahi:**
 - 1) Bagian Penataan Daerah dan Perangkat Pemerintahan, terdiri dari:
 - (a) Subbag Penataan Daerah, Mukim dan Gampong
 - (b) Subbag Perangkat Pemerintahan dan Hubungan antar Lembaga, dan
 - (c) Subbag Pemilu dan Pemilihan.
 - 2) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - (a) Subbag Ketentraman dan Ketertiban, kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - (b) Subbag Perbatasan Negara dan Pertanahan; dan
 - (c) Subbag Perbatasan Daerah dan Toponimi
 - 3) Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha dan Administrasi Pemerintahan Daerah;
 - (b) Subbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 - (c) Subbag Pengembangan dan Evaluasi Otonomi Daerah.
 - b. **Biro Hukum, membawahi:**
 - 1) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- (a) Subbag Fasilitasi dan Konsultasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota
 - (b) Subbag Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - (c) Subbag Sikronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota.
- 2) Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, terdiri dari:
- (a) Subbag Bantuan Hukum;
 - (b) Subbag Penyelesaian Sengketa Hukum;
 - (c) Subbag Naskah Kerjasama dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
- 3) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari;
- (a) Subbag Tata Usaha
 - (b) Subbag Qanun Aceh dan Sosialisasi Produk Hukum; dan
 - (c) Subbag Peraturan dan Keputusan Gubernur.

c. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari:
- (a) Subbag Urusan Haji dan Pembinaan Keagamaan;
 - (b) Subbag Kerjasama Ulama dan Umara; dan
 - (c) Subbag Pembinaan Kelembagaan dan Pengkajian Kerukunan Umat Beragama.
- 2) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- (a) Subbag Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;
 - (b) Subbag Pembinaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - (c) Subbag Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.
- 3) Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Sosial, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha, Program dan Perencanaan;
 - (b) Subbag Pembinaan Kesejahteraan Sosial; dan
 - (c) Subbag Pembinaan Kesehatan, Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

b. Biro Perekonomian, membawahi :

- 1) Bagian Pembinaan Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - (a) Subbag Pertanian;
 - (b) Subbag Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - (c) Subbag Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 2) Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, ESDM dan Pariwisata, terdiri dari:
 - (a) Subbag Industri dan Perdagangan;
 - (b) Subbag Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
 - (c) Subbag Transportasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3) Bagian Admininstrasi Sarana Perekonomian, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Kelembagaan, Perekonomian dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - (c) Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Aceh.

c. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

- 1) Bagian Pembinaan Administrasi Insfrastruktur dan Jasa Kontruksi, terdiri dari:
 - (a) Subbag Administrasi Pembangunan Insfrastruktur;
 - (b) Subbag Administrasi Pemukiman dan Kawasan; dan
 - (c) Subbag Adminstrasi Pembinaan Jasa Kontruksi.
- 2) Bagian Pembinaan Adminstrasi Pembagunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - (a) Subbag Administrasi Pembangunan Provinsi;
 - (b) Subbag Adminstrasi Pembangunan Kab/Kota; dan
 - (c) Subbag Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Pembantuan.

- 3) Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Monitoring dan Evaluasi, dan
 - (c) Subbag Pengendalian Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan.

d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- 1) Bagian Pemilihan Penyediaan, terdiri dari:
 - (a) Subbag Konstruksi dan Konsultasi;
 - (b) Subbag Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya; dan
 - (c) Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari:
 - (a) Subbag Pengembangan Kebijakan Pengadaan;
 - (b) Subbag Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik; dan
 - (c) Subbag Layanan Pengguna
- 3) Bagian Advokasi Hukum dan Kerjasama, terdiri dari:
 - (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Fasilitasi dan Advokasi Hukum; dan
 - (c) Subbag Kerjasama Layanan Pengadaan.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a. Biro Organisasi, terdiri dari :

- 1) Bagian Kelembagaan, terdiri dari:
 - (a) Subbag Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi
 - (b) Subbag Kelembagaan Perangkat Kab/kota, dan
 - (c) Subbag Analisa dan Formasi Jabatan.
- 2) Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, terdiri dari:
 - (a) Subbag Kepegawaian;
 - (b) Subbag Perencanaan Strategis dan Kinerja;

- (c) Subbag Evaluasi dan Pelaporan SAKIP.
- 3) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Tata Laksana Pemerintahan; dan
 - (c) Subbag Pelayanan Publik dan Perpustakaan.

b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:

- 1) Bagian Humas dan Media Masa, terdiri dari
- (a) Subbag Peliputan, Hubungan dan Media Masa.
 - (b) Subbag Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan
 - (c) Subbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center.
- 2) Bagian Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Analisis, terdiri dari:
- (a) Subbag Naskah dan Makalah Pimpinan
 - (b) Subbag Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - (c) Subbag Publikasi dan Analisis.
- 3) Bagian Protokol, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro;
 - (b) Subbag Tamu, dan
 - (c) Subbag Protokol dan Acara

c. Biro Umum, membawahi:

- 1) Bagian Tata Usaha Keuangan, terdiri dari:
- (a) Subbag Administrasi Keuangan;
 - (b) Subbag Program dan Keuangan Pimpinan, dan
 - (c) Subbag Pelaporan dan Akuntansi.
- 2) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:
- (a) Subbag Rumah Tangga Pimpinan;
 - (b) Subbag Rumah Tangga Sekretariat, dan
 - (c) Subbag Administrasi Aset Sekretariat Daerah.
- 3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
- (a) Subbag Tata Usaha Biro

- (b) Subbag Pengelolaan Naskah Dinas;
- (c) Subbag Tata Usaha Pimpinan, dan
- (d) Subbag Fasilitasi Adminitrasi Staf Ahli Gubernur.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Daerah	1	1	-	-	-	-	1
2	Asisten	3	3	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli Gubernur	3	3	-	-	-	-	3
4	Biro Administrasi Pembangunan	28	19	9	-	2	21	5
5	Biro Hukum	31	20	11	-	1	25	5
6	Biro Humas dan Protokol	48	36	12	-	14	29	5
7	Biro Keistimewaan dan Kesra	64	29	35	-	8	51	5
8	Biro Organisasi	52	31	21	-	12	33	7
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	20	17	3	-	3	12	5
10	Biro Perekonomian	41	23	18	-	3	32	6
11	Tata Biro Pemerintahan	36	23	13	-	3	29	4
12	Biro Umum	240	184	56	15	122	100	3
13	Unit Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	23	10	13	2	8	13	-
14	Pelaksana Setda Aceh	47	44	3	-	-	7	40
	Total	637	443	194	17	176	352	92

Sumber Data : *Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Biro Organisasi, Januari 2018*

Dari tabel 1.1 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 443 orang

atau 69,54%, apabila dibandingkan dengan pegawai perempuan yang berjumlah 194 orang atau 30,45%.

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 352 PNS atau sebesar 55,25%, golongan II sebanyak 176 PNS atau sebesar 27,62%, golongan IV sebanyak 92 PNS atau sebesar 14,44% dan golongan I sebanyak 17 PNS atau sebesar 2,66%.

Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	1	-
2	Asisten	3	-	-	-	-	2	1
3	Staf Ahli Gubernur	3	-	-	-	1	2	-
4	Biro Administrasi Pembangunan	28	-	3	1	17	7	-
5	Biro Hukum	31	-	3	-	15	12	1
6	Biro Humas dan Protokol	48	-	13	3	20	12	-
7	Biro Keistimewaan dan Kesra	64	-	11	6	35	12	-
8	Biro Organisasi	52	-	10	6	20	16	-
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	20	-	2	1	8	9	-
10	Biro Perencanaan	41	-	3	1	24	13	-
11	Tata Biro Pemerintahan	36	-	5	2	18	11	-
12	Biro Umum	240	17	119	11	74	13	-
13	Unit Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	23	4	8	2	6	-	-
14	Pelaksana Setda Aceh	47	-	1	-	20	25	1
	Total	637	21	179	33	257	135	3

Sumber Data : *Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Biro Organisasi, Januari 2018*

Berdasarkan, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Aceh didominasi tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 257 orang atau 40,34%, tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 135 orang atau sebanyak 21,19%, tingkat SLTA sebanyak 179 orang atau 28,10%. Tingkat pendidikan SD sebanyak 7 orang atau 1,09%, tingkat SLTP sebanyak 21 orang atau 3,29%, Tingkat D3 sebanyak 33 orang atau 5,21%, sedangkan tingkat pendidikan Strata 3 merupakan tingkat pendidikan paling minim, yaitu sebanyak 3 orang atau 0,47%.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah

selama tahun anggaran 2012-2017 dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah Aceh, secara sederhana dapat di disampaikan sebagaimana lampiran tabel 2.1.

Dari tabel atas terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah selama lima tahun terakhir dalam pencapaiannya rata-rata baik dan mencapai target yang telah ditetapkan, dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2

2.4 Tantangan dan Peluang

Berkaitan dengan hasil kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/kota), hasil telaahaan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun yang akan datang, di Sekretariat Daerah Aceh tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota, namun demikian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terdapat beberapa tantangan dan peluang antara lain:

a. Tantangan

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya.

4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;

b. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh terus dilakukan.
4. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dokumen (sistem AKIP) dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus diupayakan.
5. Kuantitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah mencukupi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Aceh dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsi Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh. yang berkaitan dengan pelayanan Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terdapat 3 (tiga) permasalahan pelayanan, yang diklasifikasikan berdasarkan pada tataran kebijakan, kebutuhan teknis operasional, serta Program dan kegiatan.

1. Identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat pada tataran kebijakan sebagai berikut:
 - a. Belum Semua SKPA menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tepat administrasi, sasaran, mutu, waktu, dan manfaat
 - b. Belum tertatanya peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah.
 - c. Belum optimalnya tugas dan fungsi koordinasi serta SDM dalam mendukung pembangunan bidang Pemerintahan, keistimewaan, ekonomi, pembangunan, dan administrasi umum.
 - d. Belum optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan lintas sektor/bidang dan wilayah.
 - e. Koordinasi lembaga belum optimal; kurang mampu minimalisir ketidaksesuaian rencana dengan implementasi pembangunan;
 - f. Belum adanya kebijakan pemberian reward dan punishment dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (system AKIP);

- g. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah peraturan pemerintah, peraturan presiden, Qanun Aceh yang perlu di tindaklanjuti;
 - h. Perlu adanya kejelasan dari pengadilan berapa lama suatu kasus gugatan terhadap pemerintahan daerah dapat terselesaikan, sehingga proses penganggarannya dapat diprediksi;
 - i. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi dan kab/kota belum optimal;
2. Identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat pada tataran kebutuhan teknis operasional:
- a. Masih rendahnya kompetensi dan distribusi SDM dalam penjabaran tugas dan fungsi belum merata.
 - b. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan
 - c. Belum optimalnya tugas penyiapan kebijakan yang terkait bidang agama dan peran ulama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat
 - d. Masih terbatasnya pemahaman pihak-pihak terkait langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman komprehensif terhadap kebijakan, aplikasi maupun proses pelaksanaan;
 - e. Perlu adanya pelatihan bagi tenaga pengelola JDIH dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
 - f. Kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan masih lemah dan sarana penunjang belum memadai;
 - g. Rendahnya dukungan infrastruktur ekonomi;
 - h. Masih ada SKPA yang belum tepat fungsi dan tepat ukur;
 - i. Pelaksana reformasi birokrasi dan setiap SKPA belum optimal;

- j. Masih kurangnya sarana penyaluran informasi kepada masyarakat;
 - k. Rendahnya kesadaran instansi dalam peyediaan informasi bagi masyarakat;
 - l. Belum lengkapnya standar operasional pelayanan (SOP).
3. Identifikasi permasalahan pelayanan sekretariat pada tataran implemetasi program dan kegiatan
- 1. Sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal
 - 2. Masih terbatasnya pemahaman SDM dalam pelayanan dan kegiatan serta monitoring evaluasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2017-2022 mengacu kepada visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. bahwa RPJMA memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

a. Visi

Visi Pemerintah Aceh, yaitu **”Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”**

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut:

- 1. Aceh yang damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

2. Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.
3. Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tatakelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Aceh menetapkan misi sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas, dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan,
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

10. Pembangunan dan peningkatan kualitas insfrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

c. 15 Unggulan Aceh Hebat

Dalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akan menjalankan 15 program unggulan sebagai berikut:

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi:

- a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;
- b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;
- c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan);
- d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. Aceh Careng

Anak Aceh cerdas (careng) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang

berkualitas. Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan tersebut antara lain:

- Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;
- Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah;
- Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil;
- Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh;
- Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
- Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat internasional dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan *Master Plan* Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi (validasi data primer dan rencana pengembangan);
- b. Penerapan *Public Private Partnership* untuk utilisasi sumber daya energi skala menengah dan besar khususnya panas bumi dan tenaga air tanpa menggunakan hutang luar negeri;
- c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;

- d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas menengah;
 - e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.
 - f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.
5. Aceh MeugoÃ« dan Meulaot
- Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.
- a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
 - b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
 - c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
 - d. Kemandirian rantai pasok (*supply chain*) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
 - e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.
6. Aceh TroÃ«
- Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui:
- a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan;
 - b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;
 - c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga;
 - d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. Aceh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal;
- b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;
- c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa;

8. Aceh Kaya

Merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda;
- b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur;
- c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda.

9. Aceh Peumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;

- a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja
- b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan

- c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

10. Aceh Damai

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;

- a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai;
- b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;
- d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

11. Aceh Meudadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;

- a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan;
- b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial;
- c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai keislaman;
- d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat di setiap tingkatan.

12. Aceh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;

- Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh
- Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini
- Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan;
- Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul.

13. Aceh Green

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

- d. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
- e. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat
- g. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
- h. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

14. Aceh Seuninya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda. Pendekatan program ini dilakukan melalui:

- a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara bertahap;

- b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu;

15. Aceh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;

Berdasarkan Visi, Misi dan 15 Unggulan Aceh Hebat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), maka yang berkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh mengacu kepada misi yang ke 1, 2, 3, 9 dan misi ke 10.

No.	MISI	15 Unggulan Aceh Hebat
1	<p>MISI KE-1 Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Tata Pemerintahan • Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat • Biro Pengadaan Barang / Jasa • Biro Organisasi • Biro Umum • Biro Perekonomian • Biro Hukum • Biro Humas dan Protokol 	9 Aceh Peumulia
2	<p>MISI KE-2 Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat 	11 Aceh Meuadab
3	<p>MISI KE-3 Menjaga integritas nasionalisme dan</p>	10 Aceh Dame

	keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki <ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum • Biro Tata Pemerintahan • Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat 	
4	MISI KE-9 Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Biro Hubungan Masyarakat • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Pengadaan Barang/Jasa • Biro Hukum • Biro Umum • Biro Organisasi 	2 Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
5	MISI KE-10 Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Perekonomian 	13 Aceh Green 14 Aceh Seuninya 15 Aceh Seumeugot

3.3 Telaahan Renstra K/L

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra SKPD perlu di sinkronkan dengan Renstra Kementerian.

Sekretariat Daerah Aceh yang terdiri dari 9 Biro perlu mensinkronkan dengan tujuan dan sasaran Renstra Kementerian, Tujuan dan Sasaran beberapa kementerian sebagai berikut:

3.3.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

a. Tujuan

- Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
- Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif,
- Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien,
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
- Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas

b. Sasaran Strategis

- terwujudnya aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi
- meningkatkan akuntabilitas kinerja
- meningkatnya penerapan sistem integritas
- meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3.2 Kementerian Dalam Negeri

➤ Tujuan

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
- Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa

b. Sasaran Strategis

- Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

- Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

3.3.3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

a. Tujuan

- Mewujudkan pengaturan pengadaan yang andal

b. Sasaran Strategis

- Mewujudkan strategi dan kebijakan dibidang pengadaan yang komprehensif
- Tersusunnya peraturan yang menghasilkan pengadaan yang efektif, efisien, serta meningkatkan daya saing bangsa

3.3.4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

a. Tujuan

- Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN) dan (RKP) yang berkualitas

b. Sasaran Strategis

- terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya
- tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

3.3.5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Tujuan

- menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis

- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman, dan penganggaran.
- Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
- Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas
- Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

3.3.6 Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. Tujuan Strategis

- Menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

b. Sasaran Strategis

- Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

3.3.7 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Tujuan

- Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha kemandirian koperasi dan keterpaduan

b. Sasaran Strategis

- Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan

3.3.8 Kementerian Perdagangan

a. Tujuan

- Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
- Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
- Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
- Peningkatan dukungan kinerja perdagangan

b. Sasaran Strategis

- Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)

3.3.9 Kementerian Perindustrian

a. Tujuan

- terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing

b. Sasaran Strategis

- meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
- meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
- meningkatnya penerapan tenaga kerja disektor industri
- meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik

3.3.10 Kementerian Pariwisata

a. Tujuan

- mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional

- mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

b. Sasaran Strategis

- Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
- meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata

3.3.11 Lembaga Administrasi Negara

a. Tujuan

- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN
- Meningkatkan kualitas kebijakan

b. Sasaran Strategis

- Meningkatkan kualitas hasil kebijakan
- Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN
- Meningkatkan pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negaras
- Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

3.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan untuk masa yang akan datang.

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Biro mempunyai beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro-biro dilingkungan Setda Aceh sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi dan Kab/kota belum optimal.
2. Dalam rangka implemtasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah Regulasi yang perlu ditindaklanjuti.
3. Melakukan advokasi keberlanjutan untuk mensinkronisasikan program kegiatan terkait dengan keistimewaan dan kesra
4. Peran dan fungsi badan usaha milik Aceh (BUMA) terhadap PAA dan Perekonomian Rakyat masih lemah.
5. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
6. Implementasi Sakip di Jajaran Pemerintah Aceh, Kab/kota belum optimal
7. Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh, Kab/Kota belum optimal
8. Perlu adanya dukungan penguatan penyelenggaraan kehumasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika.
9. Belum lengkapnya standar operasional prosedur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh juga menetapkan beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sebagai berikut:

a. Tujuan

Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan, Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

1. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintah Aceh
2. Peningkatan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Terwujudnya kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan yang handal, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya penyelesaian produk Hukum Aceh dan bantuan hukum, sengketa Pemerintah Aceh
5. Mewujudkan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adat istiadat untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan Kinerja Keuangan BUMA

7. Terwujudnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien
8. Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
9. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur
10. Meningkatnya implementasi Reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota
11. Tersebarinya informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh
12. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan sekretariat dan pimpinan
13. Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang berkualitas.

c. Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat waktu
2. Skor dan Status LPPD
3. Persentase Kecamatan yang telah menerapkan PATEN
4. persentase produk hukum Daerah yang diudangkan atau ditetapkan
5. Persentase penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Aceh yang diselesaikan
6. Persentase Produk Hukum Pemerintah Aceh yang disajikan dalam JDIH
7. Persentase rekomendasi/kebijakan/ naskah di bidang pendidikan, kesehatan dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah
8. Persentase peneningkatan laba BUMA
9. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
10. Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh

11. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP “CC” keatas
12. Persentase organisasi Perangkat Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur
13. Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi
14. Persentase informasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media sosial
15. Persentase penyelesaian dokumen/naskah dinas tepat waktu sesuai dengan SOP
16. Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi
17. Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan

Berikut disampaikan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh beserta target pertahun dalam mendukung atau yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 Sebagaimana Tabel 4.1 lampiran:

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh sekretariat Daerah Aceh. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan, strategi, sasaran tujuan, visi dan misi.

Rumusan pernyataan strategi, kebijakan dan relevansinya dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Relevansi Tujuan, sasaran, strategi dan
Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh

VISI: Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintah yang Bersih, dan Melayani			
MISI: Reformasi Birokrasi untuk Tercapainya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan, Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.	Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintah Aceh	Meningkatkan sosialisasi, pembinaan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh	Terlaksanannya sosialisasi, pembinaan pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh
	Peningkatan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah		
	Terwujudnya kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan yang handal, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan Aparatur Pemerintah Kecamatan yang profesional
	Meningkatnya penyelesaian produk Hukum Aceh dan bantuan hukum, sengketa Pemerintah Aceh	Melaksanakan percepatan penyelesaian produk hukum dan batun hukum	1. peningkatan sinergitas penangan produk hukum 2. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan hukum

Mewujudkan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adat istiadat untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan kordinasi penyusunan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adat istiadat	Meningkatkan kordinasi fasilitasi penyusunan kebijakan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adat istiadat
Meningkatkan Kinerja Keuangan BUMA	Terlaksananya koordinasi, pembinaan kebijakan penanaman modal dan kinerja badan usaha milik Aceh	Pemantapan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang ekonomi
Terwujudnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien	Publikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Meningkatkan publikasi melalui media masa dan elektronik
Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPA	Fasilitasi dan bimtek untuk mendorong peningkatan nilai Evaluasi SKPA dan Kab/kota serta memberikan bimbingan bagi SKPA dan Kab/kota yang nilai kurang dari "CC"
Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur	Penataan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Aceh dan Kab/kota	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kelembagaan
Meningkatnya implementasi Reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota	Terseenggaranya Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota	Fasilitasi dan bimtek Road Map RB kepada SKPA dan pemerintah Kab/kota
Tersebaranya informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh	Publikasi terhadap kegiatan pemerintah daerah	Meningkatkan publikasi melalui media masa dan elektronik
Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan sekretariat dan pimpinan	Peningkatan kualitas Pelayanan Ketatausahaan Sekretariat dan pimpinan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekretariat dan pimpinan
Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang berkualitas	Peningkatan pelayanan administrasi pembangunan	Peningkatan penyediaan SDM yang profesional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Aceh ini, merupakan program dan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana kerja Sekretariat Daerah Aceh pada setiap tahunnya, periode 2017-2022.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja sekretariat Daerah Aceh periode 2017-2022 sebagaimana tabel lampiran 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Aceh ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran program dan kegiatan. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang akan digunakan selama 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Jangka Menengah (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 lampiran.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 – 2022 yang merupakan dokumen penting dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yang mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan (Renja) untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Aceh, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang disusun, dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansinya mencerminkan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai.

B. Saran

Keberhasilan atau tidaknya Dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh ini bukan semata-mata hanya pada proses perumusannya saja tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya bagi Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh dapat dijadikan acuan untuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2017-2022.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

Uraian	Target pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.165.870.000	51.161.209.096	56.940.992.224	53.642.324.577	56.592.852.303	35.730.203.844	46.089.992.131	50.172.449.538	51.045.716.190	52.977.319.474	91,23	90,09	88,11	95,15	93,61		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	24.363.455.000	35.207.488.000	34.553.463.768	44.727.761.500	31.071.731.625	22.652.885.581	32.020.602.665	31.986.488.606	42.318.834.938	28.034.638.806	92,98	90,95	92,57	94,61	90,22		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.242.200.000	1.784.600.000	1.383.800.000	1.797.703.500	913.200.000	1.159.279.800	1.651.715.400	1.302.484.000	1.782.427.000	876.321.000	93,32	92,55	94,15	99,15	95,96		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.082.360.000	3.762.000.000	3.344.548.900	1.683.223.289	2.197.775.176	4.942.365.504	3.500.052.844	2.780.655.061	1.465.223.125	1.968.601.162	97,25	93,04	83,14	87,04	89,57		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.489.600.000	1.105.150.000	-	-	-	2.053.085.748	933.234.457	-	-	-	82,47	84,44	-	-	-		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.472.670.000	8.333.448.500	9.356.060.000	7.836.160.163	7.473.540.000	5.226.684.732	7.268.798.205	7.496.124.184	7.025.041.600	7.353.636.449	69,94	87,22	80,12	89,64	98,39		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	183.200.000	349.380.000	110.078.000	85.518.000	299.300.000	173.535.100	317.391.350	99.786.400	48.571.900	194.663.560	94,72	90,84	90,65	56,79	65,03		
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/kota	124.818.000	120.000.000	101.648.000	120.000.000	293.000.000	121.699.000	115.937.433	98.316.800	76.192.525	172.770.900	97,50	96,61	96,72	63,49	58,96		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	4.111.200.000	8.539.309.000	8.100.389.233	7.958.723.451	6.224.361.643	3.818.443.775	7.858.569.863	7.924.055.880	7.657.607.287	5.926.765.663	92,88	92,03	97,82	96,21	96,21		
Program Penataan Daerah otonomi Baru	1.625.000.000	2.344.168.000	1.670.195.250	1.846.251.250	1.820.235.860	1.550.539.600	2.233.226.505	1.396.233.340	1.718.997.390	1.713.699.863	95,42	95,27	83,60	93,10	94,14		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	334.656.400	774.530.000	3.378.922.200	3.781.242.000	2.746.517.760	298.347.000	606.888.400	3.180.208.407	3.486.652.655	2.533.758.344	78,36	98,36	94,12	92,20	92,20		
Program pegelaran seni budaya daerah	1.212.091.500	39.299.000	31.299.000	-	-	767.580.075	31.861.000	19.122.000	-	-	63,33	81,07	61,09	-	-		
Program penelitian dan pengembangan iptek	2.471.178.100	3.869.420.000	9.150.618.180	12.269.351.038	12.170.039.000	2.415.702.000	3.635.105.510	8.860.905.105	10.785.624.688	10.800.598.278	97,76	93,94	96,83	-	88,74		
Program penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	500.000.000	920.200.000	536.418.500	650.000.000	895.195.000	463.959.000	716.221.450	513.527.100	604.386.000	850.727.800	92,79	77,83	95,73	92,98	95,03		
Program Peningkatan kualitas kelembagaan	7.084.587.500	5.073.032.000	4.175.425.073	1.308.625.950	995.907.000	5.771.496.300	4.541.440.983	3.846.414.630	1.262.225.350	917.871.460	81,47	89,52	92,12	96,45	92,16		
Program Peningkatan pelayanan kehumatan beragama	1.642.750.000	7.368.086.600	11.102.400	9.447.423.000	5.619.299.940	1.355.349.500	6.444.903.049	8.959.172.542	6.078.464.713	5.084.824.266	82,50	87,47	80,70	64,33	90,48		
Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama	-	692.975.000	350.575.000	589.209.000	-	-	153.832.200	214.344.000	434.149.535	-	-	22,20	61,14	73,68	-		
Program Peningkatan kualitas Pendidikan agama	2.054.080.500	2.014.679.600	1.895.158.500	269.802.750	260.230.000	1.176.713.375	1.831.729.030	483.273.950	243.056.692	214.251.625	57,29	90,92	25,50	90,08	82,33		
Program Pelayanan kesehatan masyarakat	331.250.000	-	-	-	-	280.470.000	-	-	-	-	84,67	84,67	-	-	-		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	113.200.000	-	-	-	-	103.266.900	-	-	-	-	91,23	91,23	-	-	-		
Program pembinaan pengemangan dan kesejahteraan aparatur	484.500.000	971.850.000	487.801.100	431.817.455	611.000.000	456.409.302	554.804.130	325.296.300	343.072.555	526.744.400	94,20	57,09	66,69	79,44	86,21		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	524.250.000	-	-	-	-	461.194.758	-	-	-	-	87,97	-	-	-	-		
Program koordinasi dan pembinaan perencanaan pemanfaatan serta pengendalian ruang	422.856.500	270.000.000	1.269.247.500	971.604.000	1.260.884.240	394.946.100	263.194.000	1.158.061.450	811.206.904	1.155.706.348	93,40	97,48	91,24	83,49	91,65		
Program pengembangan kerjasama informasi dengan media masa	2.828.800.000	6.047.290.000	4.574.586.810	5.954.438.896	3.976.456.115	2.826.953.970	5.277.135.253	4.497.759.720	5.928.102.246	3.889.474.725	99,93	87,26	98,32	99,55	97,81		
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	363.791.000	286.200.000	126.655.600	81.950.000	-	306.858.750	205.083.550	108.280.240	69.633.000	-	84,35	71,66	85,49	84,97	-		
Program pembinaan anak terlantar	1.250.000.000	-	-	-	-	618.121.500	-	-	-	-	49,45	-	-	-	-		
Program Pembinaan pengembangan dan kesejahteraan non aparatur	243.185.000	-	-	-	-	194.081.000	-	-	-	-	79,81	79,81	-	-	-		
Program peningkatan sarana Perekonomian, potensi dan kerjasama investasi, pertambangan dalam pengembangan industri perdagangan berbasis LH	-	321.190.000	5.114.330.112	2.784.440.550	3.680.150.000	-	220.309.433	3.436.348.468	1.851.684.448	2.404.538.343	-	68,59	67,19	66,50	65,33		
Program pengembangan data dan informasi	-	-	582.320.000	528.268.000	1.522.254.000	-	-	503.398.700	441.379.900	1.375.489.950	-	-	86,45	83,55	90,35		
Program peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan dan adat istiadat	-	1.951.988.000	4.092.522.405	1.138.378.000	1.188.561.500	-	1.870.793.020	1.702.144.200	909.030.606	899.923.561	-	95,84	41,59	79,85	75,71		
Program peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat	-	2.034.372.000	2.272.276.500	1.194.273.500	499.948.060	-	1.878.971.660	2.045.945.110	911.219.053	413.751.788	-	89,69	72,80	76,29	82,75		

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program peningkatan kapasitas pelayanan informasi, komunikasi	-	-	2.256.048.000	3.213.414.000	2.876.240.000	-	-	2.064.001.600	3.132.314.925	2.525.993.100	-	-	91,49	97,47	87,82		
Program Revitalisasi Badan Usaha milik Aceh (BUMA)	-	-	569.811.000	1.262.997.600	849.000.000	-	-	161.777.270	655.565.639	599.596.388	-	-	28,39	51,90	70,62		
Program Pemberdayaan fakir miskin	425.830.000	-	-	-	-	188.379.500	-	-	-	-	44,24	-	-	-			
Program pemilihan kepala daerah dan pemilu	775.000.000	400.000.000	501.318.000	-	-	753.984.200	382.920.900	442.292.000	-	-	97,29	95,73	88,23	-	-		
Program koordinasi peningkatan kapasitas kependudukan dan capil	400.000.000	200.000.000	166.198.905	180.000.000	235.559.200	385.789.500	198.168.200	152.288.100	174.997.900	227.694.000	96,45	99,08	91,63	97,22	96,66		
Program peningkatan dan kelembagaan dan aparatur	1.100.000.000	1.183.000.000	1.550.790.500	1.413.440.000	187.000.000	1.075.250.100	1.141.321.810	1.376.441.040	1.290.606.354	182.287.000	97,75	96,48	88,76	91,30	97,47		
program pembinaan dan pengembangan aparatur	179.340.000	258.730.000	-	-	-	155.900.000	238.211.500	-	-	-	86,93	92,07	-	-	-		
Jumlah	110.601.719.500	147.383.594.796	158.654.600.660	167.168.341.469	146.460.238.422	97.879.475.514	132.182.415.931	147.307.595.741	152.551.985.118	133.821.648.253				84,44	70,62		

Sumber data: Laporan Kinerja Setda Aceh tahun 2012

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Drs. DERMAWAN, MM
Pembina Utama
NIP. 19590126 198303 1 005

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Aceh 2012-2017

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur						97%	85%	85%			95%	85%	85%			97,94%	100%	100%	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukur						80%	80%	80%			75%	80%	80%			93,75%	100%	100%	
3	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh						3%	3%	60,5			5,2%	3,94%	58,25*			173,33%	131,33%	96,28	
4	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP "CC"						7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota			5 Kab/Kota	6 Kab/Kota	7 Kab/Kota			71,43%	85,71%	100,00%	
5	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh								60,5			5,20%	3,94%	58,25*			173,33%	131,33%	96,28%	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik:																			
	a. RSUZA						87,00	87,00				91,55	93,30				105,23%	107,24%		
	b. RSIA						76,00	76,00				91,55	74,00				120,46%	98,37%		
	c. RSJ						76,50	76,50				74,40	75,25				97,25%	98,37%		
	d. BP2T						82,00	82,00				81,99	81,57				99,99%	99,48%		
7	Persentase SKPA yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik								15%					18,88%					125,87	
8	Jumlah Unit Kerja dan Kab/Kota yang telah menyusun Standar Pelayanan					5 Unit 5 Kab/Kota	2 Unit 5 Kab/Kota			0	2 Unit 5 Kab/Kota				0,00%	100,00%				
9	Persentase peningkatan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) antar daerah dan kerjasama luar negeri						5 Mou/MoA	5 Mou/MoA	20%			9 Mou/MoA	9 Mou/MoA	0,00%			180%	180%	0,00%	
10	Persentase peningkatan laba Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)						20%	5%	10%		20%	5%	1,78		100,00%		100%	17,80%		
11	Persentase penyediaan informasi pengadaan barang/jasa melalui elektronik dan media cetak								100%					100%					100%	
12	Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Aceh Melalui ULP dan LPSE						100%	100%				100%	78,27%				100,00%	78,27%		
13	Persentase Pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan komitmen anggaran Kas							100%				87,97						87,97%		
14	Jumlah produk hukum yang ditetapkan					1 Prolega	1 Prolega			1 Prolega	1 Prolega				100,00%	100%				
	- Qanun					10 Qanun	10	12	10	15	15 Qnun	15	12	9	13	15,00%	100%	100,00%	90%	86,67%
	- Pergub					10 FGD		45	45	50	10 FGD		95	84	147	100%		211,11%	186,66%	294,00%
	- Kepgub					2 Naskah Kajian Akademik		347	347	800	2 Naskah Kajian Akademik		881	1400	947	100%		253,89%	225%	118,38%
						3 Penjaringan Arsipasi					2 Penjaringan Arsipasi					66,60%				
15	Jumlah sengketa hukum Pemerintah Aceh yang ditindaklanjuti						5 Kasus	37 Kasus	37 kasus	20 Kasus	5 Kasus	68 Kasus	76 kasus	17 kasus	100,00%	183,78%	205,41%	85,00%		
16	Jumlah Segmen batas yang terpasang antara Kab/Kota						10 PBU	3 Segmen	5 Segmen		9 PBU	2 Segmen		5 Segmen	90,00%	66,67%		100,00%		
17	Persentase penyelesaian Konflik pertanahan*)				20%/5 Kasus	43 Kaus	30%		30%	20%/15 kasus	43 Kasus	53,33%		45,45%	100%	100,00%	177,77%	152,00%		
18	Jumlah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat Waktu*)					23 LHE	23 Kab/Kota		23 Kab/Kota		23 LHE	18 Kab/Kota		19 Kab/kota	100,00%	78,26%		82,60%		
19	Persentase Arsip Inaktif yang masih dapat digunakan (kondisi baik)								80%					94,13					117,66%	
20	Persentase kondisi aset yang layak pakai						120 Kegiatan		80%			121 Kegiatan		85%			100,83%		106,25%	
21	Frekuensi Protokol Kerjasama KDH/Wa KDH/Sekda							120 Kegiatan					416					347%		
22	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Surat Menyurat						100%	100%				95%	100%				95,00%	100%		

Sumber data: Laporan Kinerja Setda 2012-2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pelaporan dan Evaluasi Data Dana Pembangunan Kabupaten/Kota	Sumber Dana APBA dan APBN serta Pengendalian/Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	20	60	20	18,4	92	0	78,4	3,92									
		Outcomes : Tersedianya Data Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Secara Sistem Elektronik																	
	Peningkatan Pelayanan&Sarana Administrasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Tertib Administrasi dan Teratur	20	60	20	16,6	83	0	76,6	3,83									
		Outcomes : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan SDM yang																	
		Outputs : Terlaksananya Pelanggan E-Procurement																	
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terwujudnya E-Procurement dan Peningkatan SDM penggunaan Lelang Secara Elektronik	20	60	20	16,6	83	0	76,6	3,83									
		Outcomes : Terlaksananya Proses Pelelangan Terpusat dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung																	
	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terwujudnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	20	60	20	19	95	0	79	3,95									
		Outcomes : Terwujudnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu																	
	PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG																		
		Outputs : Terarahnya Tertib Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota																	
	Pengendalian Tertib Pemanfaatan Ruang	Tercapainya Persamaan Persepsi Tertib Pemanfaatan Ruang	20	60	20	19	95	0	79	3,95									
		Outcomes : Terlaksananya Tertib Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota																	
	Pendataan dan Inventarisasi Kawasan-kawasan strategis di provinsi Aceh	Tersedianya Data Informasi Pemanfaatan Ruangan Kabupaten/Kota	20	60	20	19	95	0	79	3,95									
		Outcomes : Tersedianya Data Informasi Pemanfaatan Ruangan Kabupaten/Kota																	
		Outputs : Terlaksananya Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Se-Aceh (2x setahun)																	
	Monev dan Pelaporan Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya Laporan Hasil Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Aceh	20	60	20	18,8	94	0	78,8	3,94									
		Outcomes : Tersedianya Laporan Hasil Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Aceh																	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
		Outputs : Tersedianya Data Program Pembangunan Kabupaten/Kota																	
	Koordinasi Pembinaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Terhimpunnya Data Program Kegiatan Kabupaten/Kota	20	60	20	18,8	94	0	78,8	3,94									

Biro Kesra (renja)

Indikator Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program(renstra SKPD) tahun 2017	Realisasi Target program dan pengeluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan			Target program dan kegiatan(Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian	
				Target renja SKPD Tahun 2016	Realisasi renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi(%)		capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Wajib									
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		#####	9.747.418.471	8.833.504.500	7.657.933.494	86,4	#####	27.806.772.198	2,65
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1.191.551.125	1.131.747.872	2.234.618.875	1.018.338.129	81,9	1.191.551.125	3.341.637.126	118,22
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	18.008.500	41.747.525	24.807.000	24.502.938	98,77	18.008.500	84.258.963	467,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	93.210.000	-	-	-	-	93.210.000	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Administrasi Perkantoran	1.059.372.625	972.403.347	1.051.751.875	877.485.476	83,43	1.059.372.635	2.909.234.448	2,75
Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Aparatur	114.170.000	24.387.000	167.060.000	116.376.715	69,66	114.170.000	254.933.715	2,23
PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.850.000	39.750.000	26.846.126	26.846.125	100	26.850.000	93.446.125	348,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	26.850.000	39.750.000	26.846.126	26.846.125	1000	26.850.000	93.446.125	348,03
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERGAMA		6.537.627.403	6.078.464.713	5.619.229.940	5.084.824.266	90,49	#####	#####	2,71
Pembinaan dan Peningkatan Sarana Mesjid	Presentase Sarana Mesjid Yang Telah dibina	1.220.548.514	986.075.738	1.197.168.000	1.103.902.425	92,221	1.220.548.514	3.310.526.677	2,71
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Haji/ Umrah dengan Baik	2.025.304.000	467.191.150	953.728.000	715.678.703	75,04	2.025.304.000	3.208.173.853	1,58
Peningkatan Syiar Ramadhan	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Ibadah di Bulan Suci Ramadhan	1.199.722.000	1.575.665.013	1.176.642.940	2.145.023.922	97,31	1.199.722.000	3.920.410.935	3,27
Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Lembaga Sarana Keagamaan	1.007.750.000	1.127.296.988	985.330.000	931.282.000	94,51	1.007.750.000	3.066.328.988	3,04
Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Imam Mesjid	-	256.457.495	186.320.000	148.520.000	79,71	-	383.977.494	-
Kajian Tinggi Keislaman	Terlaksananya Kajian Tinggi Keislaman untuk Aparatur dan Masyarakat	-	163.770.000	-	-	-	-	163.770.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi 2012-2017

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh uang tepat fungsi dan tepat ukur						97%	85%	85%			95%	85%	85%			97,94%	100%	100%
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukur						80%	80%	80%			75%	80%	80%			93,75%	100%	100%
3	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh						3%	3%	60,5			5,2%	3,94%	58,25*			173,33%	131,33%	96,28
4	Jumlah Rancangan Qanun Aceh bidang Kelembagaan Perangkat Aceh				3 Qanun	1 Qanun				3 Qanun	2 Qanun				100,00%	200,00%			
5	Frekuensi keikutsertaan dalam penyusunan regulasi kelembagaan perangkat daerah secara Nasional				6 Kali	8 Kali				6 Kali	5 Kali				100,00%	62,50%			
6	Jumlah Rancangan Qanun/Peraturan Gubernur terkait Kelembagaan Perangkat daerah dan Lembaga Daerah yang ditetapkan				6 regulasi (2 Qanun 4 Pergub)	4 Pergub				9 Regulasi (2 Qanun 7 Pergub)	0 Pergub				150,00%	0,00%			
7	Jumlah Rancangan Qanun/Peraturan Gubernur,				17 Regulasi (8 Qanun Kab/Kota 9 Perbup/Perwal)	10 Qanun				46 Regulasi (38 Qanun Kab/Kota 8 Perbup/Perwal)	7 Qanun					70,00%			
	Perwal/Perbup tentang Kelembagaan Perangkat daerah					2 Perbup				4 Perbup					270,59%	200,00%			
	dan Lembaga Daerah yang terfasilitas					2 Perwal				3 Perwal						150,00%			
8	Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut serta dalam Rekornis Kelembagaan				23 Kab/Kota	23 Kab/Kota				23 Kab/Kota	23 Kab/Kota				100,00%	100,00%			
9	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP "CC"						7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota			5 Kab/Kota	6 Kab/Kota	7 Kab/Kota			71,43%	85,71%	100,00%
10	Persentase SKPA yang mendapat hasil evaluasi "B" keatas								17%					50%					294,12%
11	Persentase Peningkatan Kualitas Sistem AKIP Pemerintah Aceh						3%	3%	60,5			5,20%	3,94%	58,25*			173,33%	131,33%	96,28%
12	Jumlah SKPA dan Biro yang menyampaikan LAKIP tepat Waktu				43 SKPA 7 Biro	43 SKPA/ 7 Biro				43 SKPA 7 Biro	40 SKPA/ 6 Biro				100,00%	93,02% 85,71%			
13	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang mendapat penghargaan dari Pemerintah RI				5 Kab/Kota 5 Unit	5 Kab/Kota 6 Unit	5 Unit	6 UPP		0	5 Kab/Kota 6 Unit	11 Unit	2 UPP		0,00	100,00%	220,00%	33,33%	
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik:																		
	a. RSUZA						87,00	87,00				91,55	93,30				105,23%	107,24%	
	b. RSIA						76,00	76,00				91,55	74,00				120,46%	98,37%	
	c. RSJ						76,50	76,50				74,40	75,25				97,25%	98,37%	
	d. BP2T						82,00	82,00				81,99	81,57				99,99%	99,48%	
15	Persentase SKPA yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik								15%					18,88%					125,87
16	Jumlah Unit Kerja dan Kab/Kota yang telah menyusun Standar Pelayanan					2 Unit 5 Kab/Kota				2 Unit 5 Kab/Kota						'100,00%			
17	Persentase peningkatan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) antar daerah dan kerjasama luar negeri					5 Mou/MoA	5 Mou/MoA	20%			9 Mou/MoA	9 Mou/MoA	0,00%				180%	180%	0,00%
18	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan tata naskah dinas sesuai peraturan Perundang-undangan				5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	23 kab/Kota			7 Kab/Kota	5 Kab/Kota	23 Kab/Kota			140,00%	'100,00%	100,00%		
19	Jumlah Unit Kerja yang menyusun SOP					3 Unit					3 Unit					'100,00%			
20	Jumlah analisa Jabatan SKPA, UPTD dan UPTB yang ditetapkan dengan Pergub				25 Pergub	15 Pergub				21 Pergub	20 Pergub				84,00%	133,33%			
21	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja				10 Kab/Kota	7 Kab/Kota				10 Kab/Kota	7 Kab/Kota				100,00%	'100,00%			
22	Jumlah PNS Kab/Kota yang mengikuti Bimtek Penusunan SOP					50 PNS					50 PNS					'100,00%			
23	Jumlah Juklak dan Juknis bidang ekonomi yang sesuai peraturan perundang-undang						2 Dokumen					2 Dokumen					100%		
24	Persentase peningkatan laba Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)					20%		5%	10%		20%		5%	1,78		'100,00%		100%	17,80%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
25	Persentase pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Aceh secara e-procurement							100%	100%				78,27%	100%				78,27%	100%	
26	Persentase penyediaan informasi pengadaan barang/jasa melalui elektronik dan media cetak								100%					100%					100%	
27	Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Aceh Melalui ULP dan LPSE							100%					78,27%					78,27%		
28	Persentase Pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan komitmen anggaran Kas							100%					87,97					87,97%		
29	Jumlah produk hukum yang ditetapkan					1 Prolega					1 Prolega					100%				
	- Qanun					10	12	10	15		15	12	9	13		100%	100,00%	90%	86,67%	
	- Pergub						45	45	50			95	84	147			211,11%	186,66%	294,00%	
	- Keggub						347	347	800			881	1400	947			253,89%	225%	118,38%	
30	Jumlah sengketa hukum Pemerintah Aceh yang ditindaklanjuti					5 Kasus		37 kasus	20 Kasus		5 Kasus		76 kasus	17 kasus		100,00%		205,41%	85,00%	
31	Jumlah Segmen batas yang terpasang antara Kab/Kota					10 PBU			5 Segmen		9 PBU			5 Segmen		90,00%			100,00%	
32	Persentase penyelesaian Konflik pertanahan*)				20%/5 Kasus				30%	20%/15 kasus				45,45%	100%				152,00%	
33	Jumlah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat Waktu*)					23 LHE			23 Kab/Kota		23 LHE			19 Kab/kota		100,00%			82,60%	
34	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyelesaian percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran				4 Kab/Kota	4 kab/Kota	4 Kab		4 Kab	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab		2 Kab	100%	100,00%	100,00%		50,00%	
35	Tersedianya data Informasi Kependudukan yang akurat dan tercapainya Penyerapan e-KTP				100%	80%				89,51%	80%				89,5%	100%				
36	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun Qanun tentang Gampong*)						23 Kab/Kota					18 Kab/Kota						78,26%		
37	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun Qanun tentang Mukim*)						23 Kab/Kota					20 Kab/Kota						86,96%		
38	Persentase pemenuhan biaya operasional Mesjid Raya Baituraahman								22,5					22,5					100,00%	
39	Frekwensi fasilitasi, Koordinasi dan Pelaksanaan hari-hari besar Islam Tahun 2016								7 kali					7 kali					100,00%	
40	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama						4 Kali					4 kali						100,00%		
41	Jumlah Rumah Ibadah yang mendapat bantuan						467					453						97,00%		
42	Tersedianya data Informasi dan tampilan tentang potensi daerah						75%					65%						86,67%		
43	Tersedianya data kawasan strategis daerah						75%					75%						100,00%		
44	Jumlah Informasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Masyarakat yang terpublikasi melalui Website						4.000	900 Informasi	900 Informasi			4.461	1.333 Informasi	930 Informasi				116,53%	148,11%	103,33%
45	Persentase arsip inaktif yang masih dapat digunakan (kondisi baik)								80%					94,13					117,66%	
46	Persentase kondisi aset yang layak pakai						120 Kegiatan		80%			121 Kegiatan		85%				100,83%	106,25%	
47	Frekuensi Protokolier Kenegaraan KDH/Wa KDH/Sekda							120 Kegiatan					416						347%	
48	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Surat Menyurat						100%	100%				95%	100%					95,00%	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Pemilihan penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%					
2	Presentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	60%	60%	60%					
3	Presentase Pelaksana Kerjasama dengan Stakeholder	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	82%	82%	82%	82%	82%					
4	Presentase Aparatur dan Penyedia yang telah Memenuhi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	100%	100%	100%	20%	20%	87%	87%	87%	20%	20%					
5	Presentase Pengelolaan Infrastruktur dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	100%	100%	100%	20%	20%	95%	95%	95%	19%	19%					
6	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%					

biro administrasi pembangunan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program(renstra SKPD) tahun 2108	Realisasi Target program dan pengeluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan			Target program dan kegiatan(Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian	
				Target renja SKPD Tahun 2016	Realisasi renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2017)	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outputs : Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	60	20	9	45	0	69	0
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Berbantuan	Outputs : Tersedianya Data Pelaksanaan Kegiatan DAK, Dekon dan TP Outcomes : Tersedianya Data Perencanaan Alokasi Dana DAK, Dekon dan TP pemerintah Aceh	20	60	20	13,6	68	20	93,6	4,68
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA									
Sinkronisasi dan Sinerji Program Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	Outputs : Terwujudnya persamaan persepsi Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Outcomes : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	20	60	30	12,8	64	20	92,8	4,64
PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA									
Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Outputs : Terpantainya Prmasalahan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Outcomes : Tersedianya Data Hasil Pemantauan Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Outputs : Terpantainya Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemukiman dan Adanya Kabupaten/Kota Peserta Penghargaan Adipura Puritama serta Terpantainya Rencana Pelaksanaan Sinitasi Kabupaten/Kota	20	60	20	18,8	94	20	98,8	4,94
Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Outcomes : Terdatanya Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman	20	60	20	17,8	89	20	97,8	4,89

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Permukiman dan Tersedianya Data Penilaian Desakonsi Adipura Destoma Kabupaten/Kota																		
		Outputs : Terpantainya Pembangunan dan Permasalahan Bidang Sumber Daya Air dan Air Bersih Kabupaten/Kota																		
	Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	Outcomes : Terdatanya Permasalahan Pelaksanaan Pembabngunan Bidang Sumber Daya Air dan Air Bersih	20	60	20	19,2	96	20	99,2	4,69										
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK																			
		Outputs : Tersedianya Data Laporan dan Evaluasi Kegiatan Sumber Dana APBA dan APBN serta Pengendalian/Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan																		
	Pelaporan dan Evaluasi Data Dana Pembangunan Kabupaten/Kota	Outcomes : Tersedianya Data Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Secara Sistem Elektronik	20	60	20	18,4	92	0	78,4	3,92										
		Outputs : Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Tertib Administrasi dan Teratur																		
	Peningkatan Pelayanan&Sarana Administrasi	Outcomes : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan SDM yang	20	60	20	16,6	83	0	76,6	3,83										
		Outputs : Terlaksananya Pelanggan E-Procurement																		
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Outcomes : Terwujudnya E-Procurement dan Peningkatan SDM penggunaan Lelang Secara Elektronik	20	60	20	16,6	83	0	76,6	3,83										
		Outputs : Terlaksananya Proses Pelelangan Terpusat dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung																		
	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Outcomes : Terwujudnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	20	60	20	19	95	0	79	3,95										
	PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG																			
		Outputs : Terarahnya Tertib Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota																		
	Pengendalian Tertib Pemanfaatan Ruang	Outcomes : Tercapainya Persamaan Persepsi Tertib Pemanfaatan Ruang	20	60	20	19	95	0	79	3,95										
		Outputs : Terlaksananya Tertib Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota																		
	Pendataan dan Inventarisasi Kawasan-kawasan strategis di provinsi Aceh	Outcomes : Tersedianya Data Informasi Pemanfaatan Ruangan Kabupaten/Kota	20	60	20	19	95	0	79	3,95										
		Outputs : Terlaksananya Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Se-Aceh (2x setahun)																		
	Monev dan Pelaporan Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Outcomes : Tersedianya Laporan Hasil Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Aceh	20	60	20	18,8	94	0	78,8	3,94										
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																			
		Outputs : Tersedianya Data Program Pembangunan Kabupaten/Kota																		
	Koordinasi Pembinaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Outcomes : Terhimpunnya Data Program Kegiatan Kabupaten/Kota	20	60	20	18,8	94	0	78,8	3,94										

Biro Kesra (renja)

Indikator Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program(renstra SKPD) tahun 2017	Realisasi Target program dan pengeluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan			Perkiraan realisasi capaian		
				Target renja SKPD Tahun 2016	Realisasi renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi(%)	Target program dan kegiatan(Renja SKPD tahun 2017)	capaian program dan kegiatan s/ d tahun berjalan	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Wajib																		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan									86,4			2,65						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	18.008.500	41.747.525	24.807.000	24.502.938				98,77	18.008.500	84.258.963	467,88						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		93.210.000	-	-				-		93.210.000	-						
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Administrasi Perkantoran	1.059.372.625	972.403.347	1.051.751.875	877.485.476				83,43			2,75						
	Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Aparatur	114.170.000	24.387.000	167.060.000	116.376.715				69,66	114.170.000	254.933.715	2,23						
	PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.850.000	39.750.000	26.846.126	26.846.125				100	26.850.000	93.446.125	348,03						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	26.850.000	39.750.000	26.846.126	26.846.125				1000	26.850.000	93.446.125	348,03						
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERGAMA									90,49			2,71						
	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Mesjid	Presentase Sarana Mesjid Yang Telah dibina	1.220.548.514	986.075.738	1.197.168.000	1.103.902.425				92,221			2,71						
	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Haji/ Umrah dengan Baik	2.025.304.000	467.191.150	953.728.000	715.678.703				75,04			1,58						
	Peningkatan Syiar Ramadhan	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Ibadah di Bulan Suci Ramadhan	1.199.722.000	1.575.665.013	1.176.642.940	2.145.023.922				97,31			3,27						
	Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Lembaga Sarana Keagamaan	1.007.750.000	1.127.296.988	985.330.000	931.282.000				94,51			3,04						
	Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Imam Mesjid	-	256.457.495	186.320.000	148.520.000				79,71	-	383.977.494	-						
	Kajian Tinggi Keislaman	Terlaksananya Kajian Tinggi Keislaman untuk Aparatur dan Masyarakat	-	163.770.000	-	-				-	-	163.770.000	-						
	Peningkatan Keagamaan	Tercapainya Pelaksanaan Perayaan dan Peringatan Hari Besar Islam	1.084.302.889	1.523.008.330	1.120.111.000	1.040.417.216				92,89			3,36						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA		66.514.861	243.056.692	260.230.000	214.251.625				82,23	66.514.861	523.823.178	211,06						
	Pembinaan dan Peningkatan SDM	Tersusunnya Regulasi Standarisasi Sekolah-sekolah Berasrama(Boarding School) di Aceh	66.514.861	-	260.230.000	214.251.625				82,33	66.514.861	280.766.496	422,11						
	Pembinaan Program Biaya Siswa Khusus (S1, S2 & S3) Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penerima Beasiswa Khusus(S1, S2 & S3) Dalam dan Luar Negeri yang telah dibina	-	243.065.692	-	-				-	-	243.056.692	-						
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA		120.009.000	434.149.535	-	-				-	120009000	554.158.535	-						
	Koordinasi dan Silaturahmi Umara-Ulama	Dapat Terbinanya Hubungan Umara dan Ulama	120.009.000	434.149.535	-	-					120009000	554.158.535	-						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT									75,72	1229452500	*****	2,40						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan Lintas Stageholder	176.200.000	107.025.315	200.608.500	170.073.400				84,78	176200000	453.928.715	2,57						
	Pembinaan Lembaga Penunjang Kegiatan Pendidikan	Tersalurnya Bantuan untuk Lembaga Penunjang Kegiatan Pendidikan Bantuan Asrama Mahasiswa	-	-	257.042.000	92.600.950				36,03	-	92.600.950	-						
	Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan Serta Adat Istiadat	Terciptanya Monitoring Kegiatan Kelembagaan Adat Kab/Kota	1.053.252.500	709.089.170	730.911.000	637.247.211				87,19	1053252500	*****	2,28						
	Pembinaan Meunasah dan Peningkatan Sarana Meunasah/Sejenisnya	Presentase Pembinaan Melalui Bantuan Meunasah Kab/Kota dalam Provinsi	-	92.916.121	-	-				-	-	-	-						
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									82,76	1322331465	*****	2,00						
	Kordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Ormas dalam Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	207.519.000	328.227.544	153.225.732	143.282.152				93,51	207519000	679.028.696	3,27						
	Koordinasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.114.812.465	162.877.100	113.052.328	99.877.433				88,35	1114812465	*****	1,24						
	Koordinasi Rapat Kerja Bidang Pembinaan Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Sosial, Raker-raker Bidang Kepmudaan/Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat	-	420.014.409	233.670.000	170.592.203				73,01	-	590.606.612	-						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMA**

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMA
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi birokrasi	N/A	61,11	62,11	63,11	64,11	65,11	65,11
2	Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,5518/Tinggi	2,60/Tinggi	2,65/Tinggi	2,70/Tinggi	2,75/Tinggi	2,80/Tinggi	2,80/Tinggi
3	Persentase penciptaan pengelolaan dan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa	99,62	95,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
4	Perolehan Nilai Sakip	N/A	61	62	63	63,5	64	64
5	Indeks Pelayanan Publik	40,82/C	60,00/C	70,00/B	75,00/B	80,00/B	85,00/A	85,00/A
6	Jumlah turunan regulasi UUPA	46	2	2	3	3	3	3
7	Persentase PP yang diselesaikan	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
8	Persentase Qanun yang diselesaikan	77,00	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00
9	Jumlah Qanun yang diselesaikan bisa	3	3	3	2	1	0	0
10	Indeks keterbukaan informasi publik	0,389	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313	0,313
11	Persentase informasi publik yang diumumkan	30,00	50,00	65,00	85,00	95,00	100,00	100,00
12	Persentase informasi publik yang disediakan	25,00	40,00	65,00	80,00	95,00	100,00	100,00
13	Persentase layanan informasi publik	25,00	40,00	70,00	80,00	95,00	100,00	100,00
14	Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	15,00	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
15	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat terpadu	15,00	30,00	50,00	70,00	85,00	100,00	100,00
16	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	N/A	95,50	95,80	97,20	97,90	98,40	98,40

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Drs. DERMAWAN, MM

Pembina Utama

NIP. 19590126 198303 1 005

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan, keistimewaan, administrasi umum serta perekonomian dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.	Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintah Aceh	Persentase Pemerintah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat waktu	66	73	80	83	90
		Peningkatan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor dan Status LPPD	2,60	2,66	2,71	2,74	2,80
		Terwujudnya kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan yang handal, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kecamatan yang telah menerapkan PATEN	41,52	42,9	43,59	44,29	44,98
		Meningkatnya penyelesaian produk Hukum Aceh dan bantuan hukum, sengketa Pemerintah Aceh	persentase produk hukum Daerah yang diudangkan atau ditetapkan	90	90	95	95	95
			Persentase penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Aceh yang diselesaikan	90	90	95	95	95
			Persentase Produk Hukum Pemerintah Aceh yang disajikan dalam JDIH	90	90	95	95	95
		Mewujudkan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adat istiadat untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pendidikan, kesehatan dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	20	20	20	20	20
		Meningkatkan Kinerja Keuangan BUMA	Persentase peningkatan laba BUMA	2,29	2,94	3,79	4,87	6,26
		Terwujudnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	80	85	90	95	98
		Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	61,00	62,00	63,00	63,50	64,00
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP "CC" keatas	23		25	27	29	31		

Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persentase organisasi Perangkat Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur	85	85	85	85	85
Meningkatnya implementasi Reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota	Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi	61,11	62,11	63,11	64,11	65,11
Tersebar nya informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh	Persentase informasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media sosial	80	83	85	90	95
Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan sekretariat dan pimpinan	Persentase penyelesaian dokumen/naskah dinas tepat waktu sesuai dengan SOP	94	98	98	98	98
	Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi	80	80	80	80	80
Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan	-	40	60	80	90

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Drs. DERMAWAN, MM
Pembina Utama
NIP. 19590126 198303 1 005

Tabel T-C.28 (7.1)

**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMA**

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMA
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi birokrasi	N/A	61,11	62,11	63,11	64,11	65,11	65,11
2	Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,5518/Tinggi	2,60/Tinggi	2,65/Tinggi	2,70/Tinggi	2,75/Tinggi	2,80/Tinggi	2,80/Tinggi
3	Persentase penerapan pengelolaan dan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa	99,62	95,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
4	Perolehan Nilai Sakip	N/A	61	62	63	63,5	64	64
5	Indeks Pelayanan Publik	40,82/C	60,00/C	70,00/B	75,00/B	80,00/B	85,00/A	85,00/A
6	Jumlah turunan regulasi UUPA	46	2	2	3	3	3	59
7	Persentase PP yang diselesaikan	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
8	Persentase Qanun yang diselesaikan	77,00	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00
9	Jumlah Qanun yang diselesaikan bisa	3	3	3	2	1	0	0
10	Indeks keterbukaan informasi publik	0,389	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313	0,313
11	Persentase informasi publik yang diumumkan	30,00	50,00	65,00	85,00	95,00	100,00	100,00
12	Persentase informasi publik yang disediakan	25,00	40,00	65,00	80,00	95,00	100,00	100,00
13	Persentase layanan informasi publik	25,00	40,00	70,00	80,00	95,00	100,00	100,00
14	Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	15,00	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
15	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat terpadu	15,00	30,00	50,00	70,00	85,00	100,00	100,00
16	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	N/A	95,50	95,80	97,20	97,90	98,40	98,40

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Drs. DERMAWAN, MM
Pembina Utama
NIP. 19590126 198303 1 005

Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah Kab/kota
Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh
Pembinaan dan Sikronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kab/kota
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kapasitas pengelolaan
Pengelolaan Perpustakaan Satuan
Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah
Penyusunan dan Penyajian Dokumen
Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
Persiapan Pelantikan Kepala Daerah dan
Rapat Kerja
Bupati /Wakilkota
Rapat Kerja APPSI
Konsultasi dan Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kota
Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah
PROGRAM PENYATUAN PERATURAN
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

<p>Evaluasi dan pengkajian produk hukum kab/kota</p>
<p>Kajian perundang-undangan daerah terhadap perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan</p>
<p>Peningkatan pelayanan bantuan hukum</p>
<p>Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum</p>
<p>Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan</p>
<p>Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan</p>
<p>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI</p>
<p>Koordinasi dan Pemantapan Pemerintah Daerah Dan Kecamatan</p>
<p>Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan Kab/Kota</p>
<p>Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/ Kota</p>
<p>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN</p>
<p>Penyelesaian P3D Daerah Induk ke Daerah Pemekaran dan Pengalihan P3D Urusan Pemerintah Konkuren</p>
<p>Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara</p>
<p>Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/kota di Aceh</p>
<p>Pembinaan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten/Kota Se Aceh</p>
<p>Pembinaan Penyelenggaraan</p>
<p>Rapat koordinasi kerjasama di wilayah perbatasan.</p>
<p>Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Tramtib</p>
<p>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>
<p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</p>
<p>Pengadaan kendaraan dinas / operasional</p>
<p>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</p>
<p>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p>
<p>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</p>
<p>Pengadaan peralatan gedung kantor</p>

Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala taman,
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
Pembiayaan dan Peningkatan Sarana Mesjid
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
Peningkatan Syiar Ramadh
Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembiayaan Lembaga Keagamaan
Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid
Peningkatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam
PROGRAM PENINGKATAN
Kegiatan Pembiayaan Kawasan Ekonomi
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA
Kegiatan Pembiayaan dan Pengembangan Hubungan Pers Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Koordinasi Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketertinggalan
Pengkatan hubungan kerjasama luar negeri
Peningkatan hubungan kerjasama antar provinsi dan antar kabupaten/kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Pembinaan Kes
Koordinasi Rapat Kerja Bidang Pembina Sosial
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Diskusi Terarah Perumusan Kebijakan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM BENGKANG DATA
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh
PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN
Pembinaan dan Pengembangan Pola
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS
Peningkatan Kemampuan Arsip dan Informasi Keneajawaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Perencanaan Pelaksanaan Pegadaaan Barang/Jasa Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan
Peningkatan Layanan Administrasi dan Sarana Pegadaaan Barang/Jasa
PROGRAM PENINGKATAN MUTU SDM, PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN
Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Bidang

<p>Penyusunan dan Perumusan Pola Kamitiran Pemerintah dengan Dunia Usaha</p> <p>Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah</p>
<p>PROGRAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK</p> <p>Penyelenggaraan layanan pengguna sistem pengadaan secara elektronik</p> <p>Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik Pengadaan</p> <p>Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi Layanan Pengadaan</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengadaan</p> <p>pengembangan Kebijakan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pngadaan Barang/Jasa</p> <p>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Secara Elektronik</p>
<p>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan</p>
<p>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan</p> <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI</p> <p>Sinkronisasi dan sinergi program pembangunan Provinsi dengan Kab/kota</p> <p>Pembinaan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</p> <p>Pemeliharaan Rut/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.</p>
<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</p> <p>Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman</p> <p>Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Program Pembinaan, Pengendalian dan Fasilitasi</p> <p>Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman</p>

Pemantauan Permasalahan inalemestrasi kegiatan Pembinaan Pembinaan
Pembinaan pelaksanaan anggaran belanja dana perimbangan provinsi
Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Kab/Kota
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Dana Perimbangan Kab/Kota
Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kab/Kota
Pembinaan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
Pembinaan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan
Pembinaan Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian
Pembinaan Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian
Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan pelayanan Tata Usaha Administrasi Pembangunan.
Pelayanan Informasi Pembangunan
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pengembangan data dan informasi
Pengembangan informasi melalui website Program Koordinasi dan pembinaan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang
Koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN Koordinasi dan Silaturahmi Ulama- Ulama
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Koordinasi dan sinkronisasi
Pembangunan Pendidikan
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Sinkronisasi dan Pembinaan Kapasitas Kelembagaan
Pembinaan Pendidikan Formal dan Informal
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT
Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan Serta Adat Istiadat
Sinkronisasi Pembinaan Kelembagaan Adat Istiadat
PROGRAM Peningkatan
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
Diskusi Terarah Perumusan Kebijakan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH
Rapat Koordinasi Teknis Rumpun Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM Peningkatan Kapasitas Pelayanan Infromasi
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan
Program Peningkatan Sarana Perekonomian, potensi dan Kerjasama Investasi, Pertambangan dalam Pengembangan
Kegiatan Koordinasi Peningkatan Perolehan Pendapatan Asli Aceh (PAAD) dan
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kegiatan Peningkatan Pengembangan Administrasi dan Sarana
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyaluran RASKIN dan SEMBAKO
Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan
Kegiatan fasilitasi pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah
Kegiatan koordinasi Pembinaan Pengembangan Ekonomi
Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflansi Daerah
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Perekonomian Aceh
Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kerjasama Luar Negeri bidang
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengelolaan dan Pengawasan
Linkungan Hidup
Kegiatan Koordinasi

Binaan Industri dan Perdagangan serta SRG
Kegiatan Koordinasi pembinaan
Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Peningkatan
Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah
Program Pengembangan Industri Strategis
Kegiatan Koordinasi Percepatan
Program Revitalisasi Badan Usaha Milik aceh(BUMA)
Kegiatan Pembinaan peningkatan Kinerja BUMD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Persiapan Pelantikan Kepala Daerah dan WKDH
Rapat Kerja Bupati/Walikota
Rapat Kerja APPSI
Konsultasi dan Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan DPRK serta DPRK se- Provinsi Aceh
Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah
Program Pemilihan Kepala Daerah
Persiapan Pelaksanaan Pemiluakada
Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan
Rapat Kerja bidang Kependudukan
Grand design Kependudukan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penyusunan LPPD Aceh
Penyusun LKPj Gubernur Aceh
Rapat Kerja Camat Se Aceh
Penataan Daerah pada Kab/Kota
Penataan Batas Wilayah Mukim dan Gampong
Program Pengadaan Tanah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan Rumpun Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Kesehatan Esensial

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Aceh

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi			
			Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPA					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	95%	95%	750.000.000	95%	850.000.000	95%	900.000.000	95%	950.000.000	95%	950.000.000	95%	4.400.000.000	Biro Organisasi	Provinsi Aceh		
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya bahan habis pakai	90%	90%		90%	850.000.000	90%	900.000.000	90%	950.000.000	90%	950.000.000		3.650.000.000				
	Persentase Pemenuhan Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan	90%	90%		90%		90%		90%		90%							
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Persediaan Barang Cetak dan Pengandaan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kinerja Pegawai	12 bulan	12 bulan	17.869.250	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	66.500.000	12 bulan	73.205.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	217.000.000	100%	14.000.000	100%	15.400.000	100%	16.940.000	100%	18.634.000	100%	20.497.400				
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 buah	12 buah	1.209.272.730	12 bulan	1.442.309.500	12 bulan	1.586.540.450	12 bulan	1.745.194.495	12 bulan	1.919.713.945	12 bulan	2.111.685.339				
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Aparatur	Terperuhinya Pelayanan Kesehatan 1.042 org Apartur dan Keluarga di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Terperuhinya Obat-obatan di Klinik Setda Aceh Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kinerja Pegawai	12 bulan	12 bulan	28.388.500	12 bulan	338.338.500	12 bulan	372.171.800	12 bulan	409.388.980	12 bulan	450.327.878	12 bulan	495.360.666	Biro Tata Pemerintahan			
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya alat penunjang kedinasan			1 Rehap Ruang Kerja dan tersedianya 16 Tenaga Adm dari Pegawai Honorer		985.000.000	Penyediaan peralatan kantor dan tersedianya 16 Tenaga Adm dari Pegawai Honorer		1.175.000.000	Penyediaan peralatan kantor dan tersedianya 16 Tenaga Adm dari Pegawai Honorer		900.000.000	Penyediaan peralatan kantor dan tersedianya 16 Tenaga Adm dari Pegawai Honorer	80%			4.910.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		98%	99.500.000	90%	99.500.000	95%	109.450.000	95%	120.395.000	95%	132.434.500					Biro Hukum	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		98%	330.300.000	90%	330.300.000	95%	363.330.000	95%	399.663.000	95%	439.629.300						
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat tulis Kantor		95%	715.000.000	95%	786.500.000	95%	865.150.000	95%	951.665.000	95%	1.046.831.500	95%	1.151.514.650				
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Ketersediaan barang cetak dan pengandaan		95%	398.500.000	95%	438.350.000	95%	482.185.000	95%	530.403.500	95%	583.443.850	95%	641.788.235	Biro Umum			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		95%	1.337.000.000	95%	1.470.700.000	95%	1.617.770.000	95%	1.779.547.000	95%	1.957.501.700	95%	2.153.251.870				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan bahan logistik		95%	3.030.000.000	95%	3.333.000.000	95%	3.666.300.000	95%	4.032.930.000	95%	4.436.223.000	95%	4.879.845.300				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terperuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		95%	550.000.000	95%	605.000.000	95%	665.500.000	95%	732.050.000	95%	805.255.000	95%	885.780.500				
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan biaya penunjang operasional perkantoran		95%	26.222.575.000	95%	28.844.832.500	95%	31.729.315.750	95%	34.902.247.325	95%	38.392.472.058	95%	42.231.719.263				
Penyediaan Bahan Perkantoran	Ketersediaan bunga ruangan pimpinan dan papan bunga		95%	540.000.000	95%	594.000.000	95%	653.400.000	95%	718.740.000	95%	790.614.000	95%	869.675.400				
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitas terhadap pelayanan terhadap KDH/WKDH Fasilitas pelayanan terhadap tamu pimpinan	1200 Keg	3.361.009.150	1500 Keg	3.697.110.065	1700 Keg	3.730.720.156	2000 Keg	4.103.792.171	2100 Keg	451.471.388	970 Keg	527.460.000					
		23 Kunjungan		35 Kunjungan		38 Kunjungan		42 Kunjungan		42 Kunjungan		20 Kunjungan						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur		100%	133.450.000									100%	133.450.000			Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Peralatan Rutin Kantor/Operasional		75%	73.450.000									100%	73.450.000				
	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		80%	60.000.000									100%	60.000.000				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeiliharnya Aset dan Sarana Perkantoran Peningkatan Kinerja Pegawai	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	216.000.000	12 bulan	259.200.000	12 bulan	311.040.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua		95%	13.690.000.000	95%	15.059.000.000	95%	16.564.900.000	95%	18.221.390.000	95%	20.043.529.000	95%	22.047.881.900				
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Ketersediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan		95%	2.194.200.000	95%	2.413.620.000	95%	2.654.982.000	95%	2.920.480.200	95%	3.212.528.220	95%	3.533.781.042				
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan perlengkapan rumah tangga pimpinan		95%	646.000.000	95%	710.600.000	95%	781.660.000	95%	859.826.000	95%	945.808.600	95%	1.040.389.460				
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Ketersediaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		95%	0	95%	0	95%	0	95%	0	95%	0	95%					
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		95%	2.535.000.000	95%	2.788.500.000	95%	3.067.350.000	95%	3.374.085.000	95%	3.711.493.500	95%	4.082.642.850	Biro Umum			
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubelair		95%	17.950.000.000	95%	19.745.000.000	95%	21.719.500.000	95%	23.891.450.000	95%	26.280.595.000	95%	2.890.865.450				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terperuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		95%	2.802.100.000	95%	3.082.310.000	95%	3.390.541.000	95%	3.729.595.100	95%	4.102.554.610	95%	4.512.810.017				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terperuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		95%	4.084.940.395	95%	4.493.434.435	95%	4.942.777.878	95%	5.437.055.666	95%	5.980.761.232	95%	6.578.837.356				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terperuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		95%	8.280.000.000	95%	9.108.000.000	95%	10.018.800.000	95%	11.020.680.000	95%	12.122.748.000	95%	13.335.022.800				

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	95%	785.000.000	95%	863.500.000	95%	949.850.000	95%	1.044.835.000	95%	1.149.318.500	95%	1.264.250.350	Biro Umum	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	95%	1.763.000.000	95%	1.939.300.000	95%	2.133.230.000	95%	2.346.553.000	95%	2.581.208.300	95%	2.839.329.130		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	95%	1.275.000.000	95%	1.402.500.000	95%	1.542.750.000	95%	1.697.025.000	95%	1.866.727.500	95%	2.053.400.250		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya	95%	1.923.600.000	95%	2.115.960.000	95%	2.327.556.000	95%	2.560.311.600	95%	2.816.342.760	95%	3.097.977.036		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR															
Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	60,25	61,00	62,00	63,00	63,50	64,00	65,00							
	Perolehan indeks Reformasi Birokrasi	60,11	61,11	62,11	63,11	64,11	65,11	65,11							
Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh	Persentase Perangkat Aceh yang difasilitasi/asistansi OPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	60%	550.000.000	80%	720.000.000	80%	864.000.000	80%	1.036.800.000	80%	1.244.160.000	100%	4.414.960.000	Biro Organisasi
Pembinaan dan Sikronisasi Analisa Jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah SKPA yang difasilitasi/evaluasi penyusunan analisa Jabatan	15 SKPA	20 SKPA/Unit Kerja	420.000.000	20 SKPA/Unit Kerja	504.000.000	20 SKPA/Unit Kerja	604.800.000	20 SKPA/Unit Kerja	725.760.000	20 SKPA/Unit Kerja	870.912.000	47 SKPA/Unit Kerja	3.125.472.000	Biro Organisasi
	Jumlah SKPA yang difasilitasi/evaluasi penyusunan analisa beban kerja	-	20 SKPA/Unit Kerja		20 SKPA/Unit Kerja		20 SKPA/Unit Kerja		20 SKPA/Unit Kerja		20 SKPA/Unit Kerja		47 SKPA/Unit Kerja		
	Jumlah Pemerintah Kab/kota yang dibina penyusunan analisis jabatan/analisis beban kerja	10 kab/kota	10 kab/kota		12 Kab/Kota		14 Kab/kota		16 kab/kota		18 kab/kota		23 Kab/Kota		
	Jumlah SKPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja/Analisis Jabatan	47 SKPA	47 SKPA		-		47 SKPA		-		47 SKPA		47 SKPA		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah SKPA yang difasilitasi penyusunan Standar Pelayanan	10 SKPA	10 SKPA	600.000.000	10 SKPA	720.000.000	10 SKPA	864.000.000	10 SKPA	1.244.160.000	10 SKPA	4.464.960.000	50 SKPA	7.893.120.000	Biro Organisasi
	Jumlah pelaksanaan Bimtek Standar Pelayanan (SP)	-	1 kali		-		1 kali		-		-		2 kali		
	Frekuensi pembinaan unit Pelayanan Publik kab/kota terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik	5 Kali	5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		25 Kali		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan	Jumlah SKPA yang difasilitasi/assistensi penyusunan SOP	10 SKPA	10 SKPA	780.000.000	10 SKPA	936.000.000	10 SKPA	1.123.200.000	10 SKPA	1.347.840.000	10 SKPA	1.617.408.000	50 SKPA	5.804.448.000	Biro Organisasi
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		
	Jumlah Kab/kota yang dibina Pengelolaan Ketatalaksanaan	9 Kab/kota	9 Kab/kota		9 Kab/kota		9 Kab/kota		9 Kab/kota		9 Kab/kota		45 Kab/kota		
	Jumlah Peserta sosialisasi Tata Naskah Dinas	112 Peserta	165 Peserta		165 Peserta		165 Peserta		165 Peserta		165 Peserta		825 Peserta		
	Jumlah peserta pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP	150 Peserta	150 Peserta		-		-		150 Peserta		150 Peserta		750 Peserta		
Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja	Jumlah Penunjung Perpustakaan Setda Aceh	600 orang	800 orang	360.000.000	850 orang	432.000.000	900 orang	518.400.000	950 rang	622.080.000	1000 orang	746.496.000	1050 orang	2.678.976.000	Biro Organisasi
	Tersusun dan tersedianya katalog perpustakaan	1 Katalog	1 Katalog		1 Katalog		1 Katalog		1 Katalog		1 Katalog		5 Katalog		
	Jumlah pengadaan buku Koleksi perpustakaan	400	660		680		690		700		710		499.430		
	Jumlah peserta yang mengikuti Bedah buku	-	-		-		100		-		100		200		
Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti Fasilitas Penyusunan Perjanjian Kinerja	56 SKPA/Biro	56 SKPA/Biro	420.000.000	56 SKPA/Biro	504.000.000	56 SKPA/Biro	604.800.000	56 SKPA/Biro	725.760.000	56 SKPA/Biro	870.912.000	56 SKPA/Biro	3.125.472.000	Biro Organisasi
	Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti fasilitas penyusunan Perjanjian Kinerja berjenjang	56 SKPA/Biro	56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		
	Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti Fasilitas Penyusunan Indikator Kinerja Utama	56 SKPA/Biro	56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		56 SKPA/Biro		
Penyusunan dan Penyediaan Dokumen LAKIP	Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti Pelatihan e-SAKIP	56 SKPA/Biro	56 SKPA/Biro	600.000.000	-	720.000.000	-	864.000.000	57 SKPA/Biro	1.036.800.000	57 SKPA/Biro	1.244.160.000	57 SKPA/Biro	4.464.960.000	Biro Organisasi
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (Lk)	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		
Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Peserta Rakor Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota	300 Peserta	300 Peserta	900.000.000	200 Peserta	1.060.000.000	200 Peserta	1.272.000.000	300 Peserta	1.526.400.000	300 Peserta	1.831.680.000	300 Peserta	6.590.080.000	Biro Organisasi
	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi Road Map Reformasi Birokrasi	23 Kab/kota	23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		
	Jumlah Kabupaten/kota yang di evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	23 Kab/kota	23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		23 Kab/kota		
Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (RAKORPANDA)	Jumlah Peserta FGD Penyusunan dan reviu Road Map RB Pemerintah Aceh	30 PNS	30 PNS		-		-		30 PNS		30 PNS		30 PNS		
	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara	100 Peserta	100 Peserta	250.000.000	100 Peserta	288.000.000	100 Peserta	345.600.000	100 Peserta	414.720.000	100 Peserta	497.644.000	500 Peserta	1.795.984.000	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya program pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur.		95%	30.000.000	95%	33.000.000	95%	36.300.000	95%	39.930.000	95%	43.923.000	95%	48.315.300	Biro Organisasi
	Memiliki aparatur yang berkompeten dan profesional														

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH														
Persiapan Pelantikan Kepala Daerah dan WKDH	Terfasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan WKDH	21 KDH/WKDH	400.000.000	1 KDH/WKDH	75.000.000	2 KDH/WKDH	100.000.000	0	0	24 KDH/WKDH	750.000.000	100%	1.325.000.000	Biro Tata Pemerintahan
Rapat Kerja Bupati/Walikota	Terlaksananya Rapat Kerja Bupati Walikota se-Aceh	170 peserta	100.000.000	170 peserta	150.000.000	170 peserta	300.000.000	300 peserta	400.000.000	300 peserta	400.000.000	100%	1.325.000.000	
Rapat Kerja APPSI	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling membangun antara seluruh Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia guna mencapai sinergisitas pembangunan nasional	1 Tahun	225.000.000	1 Tahun	225.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	100%	1.200.000.000	
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terperluhinya kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH Terfalsifikasi kunker KDH/WKDH	95%	8.000.659.605	95%	8.800.725.566	95%	9.680.798.123	95%	10.648.877.935	95%	11.713.765.728	95%	12.885.142.300	Biro Umum
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terselesainya RPP/Rperpres Terlaksananya FGD teknis peraturan perundang-undangan Ketersediaan qanun aceh,pergub.kepud dan RPP/Rperpres Keselarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	98%	339.000.000	90%	339.000.000	95%	372.900.000	95%	410.190.000	95%	451.209.000			Biro Hukum
Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota	Terlaksananya evaluasi ranqanun kab/kota Tersedianya hasil klarifikasi ranqanun kab/kota Tersedianya hasil rekomendasi/hasil konsultasi ranqanun kab/kota dengan pemerintah pusat Keselarasan dan harmonisasi produk hukum kab/kota	98%	280.000.000	90%	200.000.000	95%	220.000.000	95%	242.000.000	95%	266.200.000			Biro Hukum
Kajian Perundang-undangan Daerah Terhadap Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitas/konsultasi kebijakan pemerintah kab/kota, penyusunan tata tertib dan kode etik DPRK kab/kota Terlaksananya percepatan evaluasi/klarifikasi qanun RTRW dan RDTR kab/kota Terlaksananya rekor antara pemerintah aceh dengan pemerintah kab/kota membahas issue-issue aktual bidang hukum	98%	400.000.000	90%	700.000.000	95%	770.000.000	95%	847.000.000	95%	931.700.000			Biro Hukum
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Terselesainya gugatan terhadap kepala daerah Terlaksananya pembelaan hukum terhadap masyarakat fakir miskin Terlaksananya perumusan MoU/MoA Tersedianya pengkajian naskah hibah dan perjanjian kerjasama Ketersediaan perlindungan hukum bagi aparat pemerintah aceh Kesesuaian perumusan MoU/MoA, naskah hibah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	97%	1.000.000.000	90%	2.143.200.680	95%	2.357.520.748	95%	2.593.272.823	95%	2.852.600.105			Biro Hukum
Pemantapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya dan teraplikasinya website www.jdih.acehprov.go.id Tersedianya bahan-bahan penyajian informasi hukum dan acuan pemantapan JDih Tersedianya dan terdistribusinya buku LD dan TLD Tersedianya buku informasi hukum Meningkatnya cakupan penyajian/akses informasi hukum	98%	2.580.000.000	90%	280.000.000	95%	308.000.000	95%	338.800.000	95%	372.680.000			Biro Hukum
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi MoU Helsinki Meningkatnya pemahaman aparat terhadap suatu produk hukum Tersebarluasnya peraturan perundang-undangan kepada aparat dan masyarakat	98%	350.000.000	90%	350.000.000	95%	385.000.000	95%	423.500.000	95%	465.850.000			Biro Hukum
Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan Penyusunan Qanun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya revisi PP dan Perpres tersusunnya draft Pergub Hut Aceh dan tersedianya kajian otonomi khusus dan Draft Qanun pembagian kewenangan Kabupaten/Kota	1 PP - 1 Perpres	825.000.000	1 PP - 1 Perpres	645.000.000	1 PP - 1 Perpres dan 1 draft Pergub	500.000.000	4 PP turunan UUPA	700.000.000	4 PP turunan UUPA	700.000.000	70%	3.370.000.000	Biro Tata Pemerintahan
Koordinasi Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah trantib dan ketenagakerjaan	0	0	0	0	60 Orang, 23Kab/Kota	250.000.000	60 Orang, 23Kab/Kota	300.000.000	60 Orang, 23Kab/Kota	300.000.000	80%	850.000.000	
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU														
Koordinasi dan Pemantapan Pemerintah Daerah Dan Kecamatan	Terlaksananya Koor- dinasi dan Pemantapan Pemerintah Daerah dan Kecamatan	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	275.000.000	23 Kab/Kota	275.000.000	23 Kab/Kota	300.000.000	80%	1.350.000.000	Biro Tata Pemerintahan
Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kab/Kota	Terlaksananya Pengum- pulan Data EKPOD Prov dan Kab/Kota	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	275.000.000	23 Kab/Kota	275.000.000	23 Kab/Kota	300.000.000	80%	1.350.000.000	

Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan terhadap penyusunan LPPD Kabupaten/ Kota	23 Kab/Kota	190.000.000	23 Kab/Kota	190.000.000	23 Kab/Kota	200.000.000	23 Kab/Kota	200.000.000	23 Kab/Kota	200.000.000	100%	980.000.000	
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan PATEN di Kab/ Kota	6 Kab/Kota	250.000.000	6 Kab/Kota	250.000.000	6 Kab/ Kota	275.000.000	5 Kab/Kota	250.000.000	-	-	100%	1.025.000.000	
Penyelesaian P3D Daerah Induk ke Daerah Pemekaran dan Pengalihan P3D Urusan Pemerintah Konkuren	Terlaksananya Penyerahan P3D Daerah Induk ke Daerah Pemekaran dan Pengalihan P3D Urusan Pemerintah Konkuren	23 Kab/Kota	1.200.000.000	6 Kab/Kota	300.000.000	6 Kab/ Kota	350.000.000	-	-	-	-	100%	1.850.000.000	
Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara	Facilitasi penyelesaian batas wilayah Administrasi Pemerintahan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan Terpasang PBU/PBA	8 PBU dan 1 Rehap Pintu Gerbang antar Aceh-Sumut	1.700.000.000	10 PBU	1.650.000.000	8 PBU	1.500.000.000	8 PBU	1.550.000.000	8 PBU	1.550.000.000	40 PBU	7.950.000.000	
Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/kota di Aceh	Facilitasi penyelesaian batas wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota di Aceh dan Terpasang PBU/PBA	4 Segmen	900.000.000	4 Segmen	900.000.000	4 Segmen	1.000.000.000	4 Segmen	1.050.000.000	4 Segmen	1.100.000.000	20 Segmen	4.950.000.000	
Pembinaan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten/Kota Se Aceh	Terlaksananya pembinaan nama rupabumi	23 Kab/Kota	300.000.000	23 Kab/Kota	300.000.000	23 Kab/Kota	325.000.000	23 Kab/Kota	350.000.000	23 Kab/Kota	400.000.000	100%	1.675.000.000	
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN	Terlaksananya Pembinaan PATEN di 23 Kab/Kota	5 Kab/Kota	250.000.000	5 Kab/Kota	275.000.000	5 Kab/Kota	275.000.000	8 Kab/Kota	350.000.000			23 Kab/kota	1.150.000.000	
Rapat koordinasi Batas Negara	Terlaksananya Rakor batas negara			60 Orang	225.000.000	60 Orang	250.000.000	60 Orang	250.000.000	60 Orang	300.000.000		1.025.000.000	
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi penyusunan SPM Pemerintahan Daerah dan Koordinasi/Pembinaan Penyusun SPM			70 Orang dan 23 Kab/Kota	300.000.000	100%	900.000.000							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	95%	13.690.000.000	95%	15.059.000.000	95%	16.564.900.000	95%	18.221.390.000	95%	20.043.529.000	95%	22.047.881.900	
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Ketersediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	95%	2.194.200.000	95%	2.413.620.000	95%	2.654.982.000	95%	2.920.480.200	95%	3.212.528.220	95%	3.533.781.042	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan perlengkapan rumah tangga pimpinan	95%	646.000.000	95%	710.600.000	95%	781.660.000	95%	859.826.000	95%	945.808.600	95%	1.040.389.460	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	95%	2.535.000.000	95%	2.788.500.000	95%	3.067.350.000	95%	3.374.085.000	95%	3.711.493.500	95%	4.082.642.850	
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubelair	95%	1.795.000.000	95%	1.974.500.000	95%	2.171.950.000	95%	2.389.145.000	95%	2.628.059.500	95%	2.890.865.450	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	95%	2.802.100.000	95%	3.082.310.000	95%	3.390.541.000	95%	3.729.595.100	95%	4.102.554.610	95%	4.512.810.071	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95%	4.084.940.395	95%	4.493.434.435	95%	4.942.777.878	95%	5.437.055.666	95%	5.980.761.232	95%	6.578.837.356	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95%	8.280.000.000	95%	9.108.000.000	95%	10.018.800.000	95%	11.020.680.000	95%	12.122.748.000	95%	13.335.022.800	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	95%	785.000.000	95%	863.500.000	95%	949.850.000	95%	1.044.835.000	95%	1.149.318.500	95%	1.264.250.350	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	95%	1.763.000.000	95%	1.939.300.000	95%	2.133.230.000	95%	2.346.553.000	95%	2.581.208.300	95%	2.839.329.130	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	95%	1.275.000.000	95%	1.402.500.000	95%	1.542.750.000	95%	1.697.025.000	95%	1.866.727.500	95%	2.053.400.250	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	95%	1.476.000.000	95%	1.623.600.000	95%	1.785.960.000	95%	1.964.556.000	95%	2.161.011.600	95%	2.377.112.760	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Perkembangan Aset dan Sarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	216.000.000	12 bulan	295.200.000	12 bulan	311.040.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA														
Pembinaan dan Peningkatan Sarana Mesjid	Terbinanya 46 imam, Mesjid Kabupaten dan Kota	100%	100%	792.413.500	100%	306.298.000	100%	367.557.600	100%	441.069.120	100%	529.282.944	100%	635.139.533
	Terperuhnya Biaya Rekening Listrik dan Air, Mesjid Raya, Baiturrahman Selama 1 Tahun													
	Peningkatan Kualitas Sarana Ibadah dan Keagamaan													
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji Daerah	100%	100%	1.560.133.000	100%	2.867.000.000	100%	3.440.400.000	100%	4.128.480.000	100%	4.954.176.000	100%	5.945.011.200
	Terkoordinirnya Bimbingan Menasik Haji se-Aceh													
	Terlaksananya Rekrutmen Pemandu Haji Daerah													
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji Daerah													
Peningkatan Syiar Ramadhan	Terkoordinirnya Pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Aceh di Kab/Kota	100%	100%	1.783.612.770	100%	1.456.000.000	100%	1.747.200.000	100%	2.096.640.000	100%	2.515.968.000	100%	3.019.161.600
	Terselenggaranya Silaturahmi Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kab/Kota dan masyarakat													
	Tersampainya Informasi Pembangunan Melalui Tausiah Ramadhan													
	Tersalurkannya Insentif Kepada Imam, Muazzin dan Khadam Mesjid yang Dikunjungi Tim Safari Ramadhan di 69 Mesjid													
	Terlaksanakannya Syiar Islam													
Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keagamaan di Kabupaten /Kota serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Keagamaan di Mushalla Meuligoe Gubernur, Wakil Gubernur Aceh dan Mushalla At-Taubah Setda Aceh	12 bulan	12 bulan	901.050.000	12 bulan	2.780.220.000	12 bulan	3.336.264.000	12 bulan	4.003.516.800	12 bulan	4.804.220.160	12 bulan	5.765.064.192
	Data lembaga Keagamaan													

Biro Tata Pemerintahan

Biro Umum

Biro keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelola Imam Mesjid	100%	100%	97.148.000	100%	212.695.000	100%	255.234.000	100%	306.280.800	100%	367.536.960	100%	441.044.352	
Peningkatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terkoordinirnya Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam Pemerintah Aceh.	6 kgt	6 kgt	1.065.659.000	6 kgt	1.885.159.000	6 kgt	2.073.674.900	6 kgt	2.281.042.390	6 kgt	2.509.146.629	6 kgt	2.760.061.292	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
	Terkoordinirnya Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam Pemerintah Aceh														
	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam Pemerintah Aceh (1 Muharram, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzul Qur'an, Hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha														
	Tercapainya Pelaksanaan Perayaan dan Peringatan Hari Besar Islam														
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA															
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Pers Masyarakat	Jumlah Iklan Kegiatan Pemerintah Aceh Melalui Media Cetak / Elektronik		250 iklan	6.672.880.427	320 iklan	7.340.168.469	420 iklan	8.074.185.315	450 iklan	8.881.603.846	470 iklan	9.769.764.230	230 iklan	3.031.387.522	Biro Hubungan Masyarakat
	Jumlah Press Release Tentang Pemerintah Aceh		950 press Release		1100 press Release		1200 press release		1300 press release		1400 press release		900 press release		
Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Foto Kegiatan Pimpinan yang Dicitak		24 album		26 album		28 album		30 album		32 album		20 album		
	Jumlah Analisis Berita yang dihasilkan		670 buah	1.786.850.000	720 buah	1.965.535.000	780 buah	2.162.088.500	810 buah	2.387.297.350	850 buah	2.616.127.085	600 buah	1.355.700.000	
	Jumlah Kliping Koran yang Dicitak		185 eks		210 eks		250 eks		280 eks		300 eks		150 eks		
	Jumlah Leaflet yang Dicitak		1500 lembar		1700 lembar		1850 lembar		2000 lembar		2100 lembar		1000 lembar		
	Jumlah Poster yang Dicitak		120 lembar		150 lembar		170 lembar		200 lembar		220 lembar		100 lembar		
Jumlah Balihyo yang Dicitak		300 buah		380 buah		400 buah		450 buah		470 buah		180 buah			
PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR															
Koordinasi Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya rapat Koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah tramtib dan ketenaga kerjaan						60 Orang - 23 Kab/Kota	250.000.000	60 Orang	300.000.000	60 Orang	300.000.000	80%	850.000.000	Biro Tata Pemerintahan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT															
Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 23 Kab/Kota	100%	100%	374.182.000	100%	1.146.482.000	100%	1.261.130.200	100%	1.387.243.220	100%	1.525.967.542	100%	1.678.564.296	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinasi Pembinaan Kesehatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Kesehatan	100%	100%	886.990.000	100%	1.357.127.750	100%	1.492.840.525	100%	1.642.124.578	100%	1.806.337.035	100%	1.986.970.739	
	Menghasilkan Rekomendasi Terkait Pembinaan Kesehatan														
	Terselenggaranya Program Kegiatan DPW Dharma Wanita Aceh														
PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR															
Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier dan Kediklatan	Jumlah ASN Setda yang difasilitasi mengikuti diklat Teknis dan Fungsional	12 ASN	12 ASN	390.000.000	12 ASN	468.000.000	12 ASN	561.600.000	12 ASN	673.920.000	12 ASN	808.704.000	12 ASN	2.902.224.000	
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS	Jumlah ASN Setda yang mendapat Cuti	210 ASN	200 ASN	384.000.000	200 ASN	460.800.000	200 ASN	552.960.000	200 ASN	663.552.000	200 ASN	796.262.400	1000 ASN	2.857.574.400	Biro Organisasi
	Jumlah ASN Setda yang menerapkan SKP	685 ASN	637 ASN		637 ASN		637 ASN		637 ASN		637 ASN		637 ASN		
	Jumlah ASN Setda yang di tetapkan kenaikan Gaji berkala	300 ASN	300 ASN		300 ASN		300 ASN		300 ASN		300 ASN		300 ASN		
	Jumlah ASN Setda yang difasilitasi kenaikan pangkat	160 ASN	160 ASN		160 ASN		160 ASN		160 ASN		160 ASN		160 ASN		
Jumlah ASN lingkup Setda yang diusulkan Satyalancana Karya	10 ASN	10 ASN		10 ASN		10 ASN		10 ASN		10 ASN		10 ASN			
Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian	Persentase Penataan Arsip Kepegawaian lingkup Setda	95%	95%	180.000.000	95%	216.000.000	95%	259.200.000	95%	311.040.000	95%	373.248.000	95%	1.339.488.000	
	Jumlah dokumen DUK Setda 2018	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															
Perencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya perencanaan pengadaan barang dan jasa	200 Paket	825.000.000	55 SKPA (330 Orang)	825.000.000	2300 Paket	974.534.000	2330 Paket	880.000.000	2330 Paket	925.000.000	4.429.534.000			
Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pelelangan barang dan jasa secara tendering dan non tendering	2300 Paket	7.569.893.243	4300 Paket	8.569.893.243	2600 Paket	9.100.503.827	2800 Paket	8.750.000.000	2800 Paket	9.810.000.000	43.800.290.313			Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhiya Data Paket Pengadaan Barang dan Jasa	2000 Paket	456.500.000	12 Laporan	456.500.000	2300 Paket	500.000.000	2330 Paket	450.000.000	2330 Paket	650.000.000	2.513.000.000			
Peningkatan Layanan Administrasi dan Sarana Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksanakannya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	80%	4.950.000.000	15 Keg	4.950.000.000	90%	4.700.000.000	100%	4.278.823.254	100%	5.366.574.392	24.245.397.646			
PROGRAM PENINGKATAN MUTU SDM, PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN ADVOKASI HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA															
Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan penyelesaian permasalahan hukum penyelenggaraan barang dan jasa	60%	75%	1.195.110.000	80%	3.463.043.495	85%	3.573.860.887	90%	3.993.000.000	95%	4.392.300.000	95%	16.617.314.382	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya kerja sama antar lembaga bidang pengadaan barang dan jasa		70%	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	60.000.000		
Penyusunan dan Perumusan Pola Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah dengan Pelaku Usaha	80%	280.600.000	60 Orang	872.000.000	70%	973.000.000	70%	1.075.165.000	70%	1.173.005.000	70%	4.373.770.000		

Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengadaan Barang /Jasa	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan tenaga pelaksana pengadaan barang dan jasa		80%	264.000.000	679 Orang	887.997.600	80%	985.860.887	80%	1.089.376.280	80%	1.192.000.000	80%	4.419.234.767	
Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terpeenuhnya SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa		6 kali	340.000.000	120 Orang	928.045.895	6 kali	815.000.000	6 kali	944.458.720	6 kali	1.062.851.000	30 kali	4.090.365.615	
PROGRAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK	Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	75%	80%	2.221.060.000	85%	2.500.000.000	90%	2.580.000.000	95%	5.445.000.000	98%	5.989.500.000	98%	18.735.560.000	
Penyelenggaraan Layanan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksanakannya Pelayanan Verifikasi Penyedia, Hrlpdesk, dan Layanan Pengguna Lainnya		80%	453.000.000	1000 penyedia & 46 Orang	503.736.000	90%	520.000.000	90%	1.395.600.000	95%	1.522.600.000	100%	4.394.936.000	
Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Pengelolaan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa		80%	562.500.000	600 Orang	625.500.000	90%	644.890.500	90%	990.000.000	95%	1.080.090.000	100%	3.902.980.500	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terpeenuhnya Standarisasi Keamanan Informasi Sistem Pengadaan Elektronik		80%	65.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	65.060.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksanakannya Pengembangan Sistem Pendukung Layanan Pengadaan Elektronik		80%	520.000.000	3 Aplikasi	578.240.000	90%	596.165.440	90%	915.000.000	90%	998.265.000	95%	3.607.670.440	
Pengembangan Kebijakan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksanakannya Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa		3 Dok	120.000.000	3 Ran. Pergub & 211 Orang	133.440.000	3 Dok	145.000.000	3 Dok	821.850.000	3 Dok	896.639.000	17 kali	2.116.929.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		12 kali	500.500.000	250 Orang	659.084.000	12 kali	673.944.060	12 kali	1.322.550.000	12 kali	1.491.906.000	61 kali	4.647.984.060	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LAKIP, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib).	80%	100%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA	Persentase rancangan perda dan Perbup APBD yang difasilitasi	-	70%	620.333.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan
Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	-	85%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan	-	40%	4.105.700.000	60%	4.237.082.400	80%	4.510.500.000	90%	4.910.500.000	90%	4.910.500.000	90%	-	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa dengan RUP	-	90%	1.347.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan.	20%	-	-	40%	5.000.000.000	60%	5.000.000.000	80%	5.000.000.000	90%	5.000.000.000	90%	-	
Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi Baik (Jalan Provinsi dalam kondisi Baik terhadap Seluruh Jalan Provinsi)	20%	-	-	40%	400.000.000	60%	400.000.000	80%	400.000.000	90%	400.000.000	90%	-	
Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Capaian Kinerja Kab/Kota terhadap seluruh Kab/Kota)	20%	-	-	40%	250.000.000	60%	250.000.000	80%	250.000.000	90%	250.000.000	90%	-	
Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman	1. Kawasan Kumuh (Capaian Kinerja Kab/Kota), 2. Rumah Laya Huni (Capaian Kinerja Kab/Kota Terhadap Seluruh Kab/Kota)	20%	-	-	Persentase tersedianya bahan habis pakai	300.000.000	60%	300.000.000	80%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	-	
Pemantauan Permasalahan Implementasi Kegiatan Sanitasi	Rumah Tangga bersanitasi (capaian kinerja Kab/kota) terhadap seluruh Kab/kota		40%	300.000.000	60%	300.000.000	80%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	-	
Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Hasil pelaksanaan PP 54/2016	20%	-	-	40%	500.000.000	60%	500.000.000	80%	500.000.000	90%	500.000.000	90%	-	
	1) Ketepatan waktu penetapan APBD 2) Turunan PP 58/2005 3) Pelaksanaan anggaran belanja urusan pelayanan dasar 4) Pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap DAU 5) Pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap total belanja 6) Pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap target anggaran	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	-	
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Dana Perimbangan Provinsi	Pelaksanaan Anggaran Belanja Bersumber Dana Perimbangan (DBHP, DBHH & SDAL, DAU, DAK, dan BTBH Migas)	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	-	
Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi	1) Tersedia RPJPD 2) Tersedia RPJMD 3) Tersedia RKPD 4) Pelaksanaan Perencanaan Pembagunan 5 Tahun	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	-	
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Kab/Kota	1) Ketepatan Waktu/Penetapan APBD 2) Turunan PP 58/2005 3) Pelaksanaan anggaran belanja Urusan Pelayanan Dasar 4) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap DAU 5) Pelaksanaan anggaran belanja Langsung Terhadap Total Belanja 6) Pelaksanaan anggaran belanja terhadap target anggaran	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	-	

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Dana Perimbangan Kab/Kota	10 Pelaksanaan Anggaran Belaja Bersumber Dana Perimbangan (DBHP, DBHH & SDAL, DAU, DAK, dan DTBH Migas	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	
Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kab/Kota	1) Tersedia RPJPD 2) Tersedia RPJMD 3) Tersedia RKPd 4) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 5 Tahun	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	
Pembinaan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Dekonsentrasi	20%	-	-	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	
Pembinaan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan	1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tugas Pembantuan	20%	-	-	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	
Pembinaan Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Program	1) Pelaksanaan monitoring program	20%	-	-	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	
Pembinaan Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Program	1) Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Program	20%	-	-	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	
Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1) Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 2) Kesesuaian Prioritas Pembangunan (Jumlah Prioritas Pembangunan Daerah (11) dibagi Jumlah Prioritas 3) Ketersediaan Buku Provinsi dalam Angka 4) Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	20%	-	-	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	
Pembinaan Pelayanan Tata Usaha Administrasi Pembangunan.	1) Dokumen Tata Usaha Biro, 2) Dokumen Program Biro 3) Dokumen Perencanaan Biro, 4) Dokumen Rumah Tangga Biro, 5) Dokumen RKA Biro, 6) Pelaporan Kinerja Biro.	20%	-	-	40%	500.000.000	50%	500.000.000	80%	500.000.000	90%	500.000.000	90%	
Pelayanan Informasi Pembangunan	1) Website Administrasi Pembangunan	20%	-	-	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1) Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2) Rasio RTH Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB (capaian Kinerja Kab/Kota Terhadap Seluruh Kab/Kota)	20%	-	-	40%	200.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	
Pembinaan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Dokumen pengendalian percepatan pelaksanaan PSN	20%	-	-	40%	500.000.000	50%	500.000.000	80%	500.000.000	90%	500.000.000	90%	
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Jumlah/jenis data dan informasi yang tersedia		70%	620.333.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan Informasi Melalui Website	Terfasilitasi monev administrasi pembangunan secara elektronik	-	1 Lap	620.333.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh	Persentase peningkatan kualitas sistem dan pengelolaan informasi serta pendokumentasian kegiatan Pemerintah Aceh	95%	1.452.758.600	95%	1.598.034.460	95%	1.757.837.906	95%	1.933.621.696	95%	2.126.983.865	95%	1.674.124.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN, PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG	Jumlah/jenis data dan informasi yang tersedia.	-	70%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kab/kota	Tercapainya persanaan persepsi terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab/kota	-	1 Lap	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA	Meningkatnya Sumber Daya dan Peran Ulama			6.442.529.000		2.741.000.000		3.015.100.000		3.316.610.000		3.648.271.000		4.013.098.100
Koordinasi dan Silaturahmi Umara-Ulama	Terseleenggaranya Sosialisasi Hasil Muzakarah Ulama Tahun 2017 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sertifikasi Halal Terbanyanya Hubungan Baik Umara dan Ulama Melalui Silaturahmi Dapat Terbiannya Hubungan Umara dengan Ulama	100%	100%	6.442.529.000	100%	2.741.000.000	100%	3.015.100.000	100%	3.316.610.000	100%	3.648.271.000	100%	4.013.098.100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	-	350.315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan	Terlaksanakannya Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan Lintas Stageholder	100%	100%	235.410.000	100%		100%		100%		100%		100%	
Pembinaan dan Peningkatan SDM	Terlaksanakannya Sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Tentang Sekolah-sekolah Berasrama(Boarding School) di Aceh	100%	100%	114.905.000	100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT	Terbiannya Kebudayaan dan Adat Istiadat			747.605.000		1.464.538.500		827.280.850		910.008.935		1.001.009.829		1.101.110.811
Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan Serta Adat Istiadat	Terciptanya Kegiatan Kelembagaan Kebudayaan dan Adat Istiadat Kab/Kota Mengasikan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pembinaan Kelembagaan Kebudayaan dan Adat Istiadat	100%	100%	747.605.000	100%	752.073.500	100%	827.280.850	100%	910.008.935	100%	1.001.009.829	100%	1.101.110.811
Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pemantapan koordinasi kebijakan Pembinaan Kelembagaan Perekonomian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Pemanfaatan KUR	-	1 Dok	180.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	440.000.000	1 Dok	484.000.000	1 Dok	532.400.000	5 Dok	2.036.400.000

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan koordinasi Pembinaan pengembangan pengelolaan pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemantapan koordinasi kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	330.000.000	1 Dok	363.000.000	5 Dok	399.300.000	9 Dok	892.560.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Inflasi Aceh sesuai dengan sasaran inflasi nasional	-	2 Dok	300.000.000	4 Dok	350.000.000	4 Dok	385.000.000	4 Dok	423.500.000	4 Dok	465.850.000	18 Dok	1.831.530.000	
Kegiatan Koordinasi pembinaan Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	Pemantapan koordinasi pembinaan kebijakan pengembangan sumberdaya peikanan dan kelautan	-	1 Dok	250.000.000	1 Dok	320.000.000	1 Dok	352.000.000	1 Dok	387.200.000	5 Dok	425.920.000	9 Dok	1.735.120.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan	Terlaksananya sinkronisasi pembangunan pendidikan lintas stakeholder	100%	100%	-	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	
Pembinaan Lembaga Pendidikan	Terlaksananya sinkronisasi pembangunan pendidikan lintas stakeholder	100%	100%	-	100%	312.465.000	100%	343.711.000	100%	378.082.650	100%	415.890.915	100%	457.480.007	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH															
Persiapan Pelantikan Kepala Daerah dan WKDH	Terfasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan WKDH		21 KDH/WKDH	400.000.000	1 KDH/WKDH	75.000.000	2 KDH/WKDH	100.000.000	0	0	24 KDH/ WKDH	750.000.000	100%	1.325.000.000	
Rapat Kerja Bupati/Walikota	Terlaksananya Rapat Kerja Bupati Walikota se Aceh		170 peserta	100.000.000	170 peserta	150.000.000	170 peserta	300.000.000	300 peserta	400.000.000	300 peserta	400.000.000	100%	1.325.000.000	
Rapat Kerja APPSI	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling membangun antara seluruh Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia guna mencapai sinergisitas pembangunan nasional		1 Tahun	225.000.000	1 Tahun	225.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	100%	1.200.000.000	
Konsultasi dan Pelayanan Urusan Kedinasin Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan DPR/ DPRD se- Provinsi Aceh	Terlaksananya Urusan Kedinasin Kepala Daerah dan Fasilitas SK Kedinasin DPR/DPK		1 Tahun Kegiatan	200.000.000	1 Tahun Kegiatan	270.000.000	1 Tahun Kegiatan	200.000.000	1 Tahun Kegiatan	215.000.000	1 Tahun Kegiatan	230.000.000		1.115.000.000	
Penilaian Kecamatan	Terlaksananya Penilaian Kecamatan		0	0	0	0	0	289 Kec	1.200.000.000	289 Kec	1.200.000.000	100%	2.400.000.000		
Koordinasi dan Penguatan Kerjasama Pemerintah Aceh	Terfasilitasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Aceh		0	0	0	100 Peserta	400.000.000	100 Orang - 1 lap	450.000.000	100 Orang - 1 lap	450.000.000	300 Peserta - 3 lap	1.300.000.000		
Persiapan Pelaksanaan Pemilu	Terlaksananya koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilu		3 Kab/Kota	650.000.000	Pileg dan Pilpres	1.750.000.000	-	-	-	Pemilu 24 KDH/WKDH	1.500.000.000	100%	3.900.000.000		
Pembekalan/Sosialisasi bagi Pemilih			0	0	0	0	0	0	0	500 Orang	1.000.000.000	100%	1.000.000.000		
Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan	Terlaksananya Rakor bidang kependudukan dan 1 grand strategi kependudukan		60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	300 Peserta	1.000.000.000	Biro Tata Pemerintahan
PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH															
Persiapan Pengadaan Tanah	Terkoordinasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum		30 Persil	500.000.000	30 Persil	500.000.000	30 Persil	550.000.000	30 Persil	550.000.000	30 Persil	550.000.000	70%	2.650.000.000	
PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU															
Persiapan Pelaksanaan Pemilukada	Terkoordinasinya Persiapan Pelaksanaan Pemilukada di 3 Kab/Kota dan persiapan Pemilu legislatif		3 Kab/Kota	450.000.000	23 Kab/Kota	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															
Rapat Kerja Bidang Kependudukan	Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Kependudukan		23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	250.000.000	23 Kab/Kota	250.000.000			
Grand Design Kependudukan	Meningkatnya pelayanan kualitas adminduk		1 Draft Kajian	650.000.000	23 Dinas	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN															
Penyusunan LPPD Aceh	Terusunnya LPPD Aceh dan Publikasi RLPPD		2 Dok	265.000.000	2 Dok	265.000.000	2 Dok	275.000.000	2 Dok	275.000.000	2 Dok	300.000.000	10 Dok	1.380.000.000	
Penyusun LKJ Gubernur Aceh	Terusunnya LKJ Gubernur Aceh		1 Dok	320.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	365.000.000	1 Dok	375.000.000	5 Dok	1.760.000.000	
Rapat Kerja Camat Se-Aceh	Terlaksananya Rapat Kerja Camat Se Aceh		350 Peserta	150.000.000	350 Peserta	150.000.000	350 Peserta	165.000.000	350 Peserta	175.000.000	350 Peserta	175.000.000	350 Peserta	815.000.000	
Penataan Wilayah Mukim dan Gampong	Terlaksananya Rapat penataan wilayah dan terdapat nama, nomor dan kode adm wilayah mukim dan Gampong		60 peserta 1 Pergun Kode Adm Pemerintahan	250.000.000	60 peserta 1 Pergun Kode Adm Pemerintahan	250.000.000	60 peserta 1 Pergun Kode Adm Pemerintahan	250.000.000	60 peserta 1 Pergun Kode Adm Pemerintahan	250.000.000	60 peserta 1 Pergun Kode Adm Pemerintahan	250.000.000		1.250.000.000	Biro Tata Pemerintahan
Penataan Batas Wilayah Mukim dan Gampong	Terlaksananya BinteK Batas Wilayah Gampong		23 Kab/Kota	200.000.000	23 Kab/Kota	200.000.000	23 Kab/Kota	225.000.000	23 Kab/Kota	225.000.000	23 Kab/Kota	200.000.000	23 Kab/Kota	200.000.000	
Program Pengadaan Tanah	Terkoordinasinya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		30 Persil	500.000.000	30 Persil	500.000.000	30 Persil	550.000.000	30 Persil	550.000.000	30 Persil	550.000.000	70%	2.650.000.000	
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN															
Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan Penyusunan Qanun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terusunnya revisi PP dan Perpres tersusunnya draft Pergub Hut Aceh dan tersedianya kajian otonomi khusus dan Draft Qanun pembagian kewenangan Kabupaten/Kota		1 PP - 1 Perpres	825.000.000	1 PP - 1 Perpres	645.000.000	1 PP - 1 Perpres dan 1 draft Pergub	500.000.000	4 PP turunan UUPA	700.000.000	4 PP turunan UUPA	700.000.000	70%	3.370.000.000	Biro Hukum
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN STRATEGIS			4 dok	1.900.000.000	12 dok	2.740.000.000	12 dok	3.014.000.000	12 dok	3.315.400.000	12 dok	3.646.940.000	52 dok	14.616.340.000	Biro
Kegiatan Koordinasi pengendalian inflasi daerah	Inflasi Aceh sesuai dengan inflasi daerah		2 dok	500.000.000	4 dok	350.000.000	4 dok	385.000.000	4 dok	423.500.000	4 dok	465.850.000	18 dok	1.831.530.000	Perekonomian

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Transportasi	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan transportasi	-	-	1 Dok	290.000.000	1 Dok	319.000.000	1 Dok	350.900.000	1 Dok	385.990.000	4 Dok	928.200.000	Biro Perekonomian	
Kegiatan Penyusunan Rencana, Standar Pelayanan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Biro Perekonomian	Dokumen Perencanaan, penganggaran, SOP dan evaluasi kinerja Biro Perekonomian	-	-	4 Dok	300.000.000	4 Dok	330.000.000	4 Dok	363.000.000	4 Dok	399.300.000	16 Dok	1.392.300.000		
Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Pangan	Pemantapan koordinasi pembinaan kebijakan Bidang Pangan serta penyaluran RASTRA	-	-	2 Dok	300.000.000	2 Dok	330.000.000	2 Dok	363.000.000	2 Dok	399.300.000	8 Dok	1.392.300.000		
Kegiatan Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian	Tersedianya sarana dan prasarana kerja biro	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.150.000.000	1 Tahun	1.265.000.000	1 Tahun	1.391.500.000	1 Tahun	1.530.650.000	5 Tahun	6.437.150.000		
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyaluran RASTRA	Pemantapan koordinasi pembinaan kebijakan penyaluran	1 Dok	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	200.000.000		
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	Rumusan Pembinaan Kebijakan Pembangunan di Bidang Perekonomian	1 Dok	300.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	385.000.000	1 Dok	423.500.000	1 Dok	465.850.000	5 Dok	1.924.350.000		
Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi		11 Dok	3.172.750.000	11 Dok	3.660.000.000	11 Dok	4.026.000.000	11 Dok	4.428.600.000	11 Dok	4.871.460.000	67 Dok	20.158.810.000		
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Pertanian	Pemantapan koordinasi pembinaan kebijakan pengembangan sumberdaya pertanian	1 Dok	450.000.000	1 Dok	550.000.000	1 Dok	605.000.000	1 Dok	665.500.000	5 Dok	732.050.000	9 Dok	3.002.550.000		
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemantapan koordinasi dan pembinaan sumberdaya kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Dok	237.000.000	1 Dok	320.000.000	1 Dok	352.000.000	1 Dok	387.200.000	1 Dok	425.920.000	5 Dok	1.722.120.000		
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Energi dan Sumber daya mineral	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ESDM	2 Dok	200.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	330.000.000	2 Dok	363.000.000	2 Dok	399.300.000	10 Dok	1.221.020.000		
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal dan Kinerja Badan Usaha Milik Aceh	Pemantapan koordinasi kebijakan Penanaman Modal dan Kinerja Badan Usaha Milik Aceh	2 Dok	1.200.000.000	2 Dok	1.100.000.000	2 Dok	1.210.000.000	2 Dok	1.331.000.000	2 Dok	1.464.100.000	10 Dok	6.305.100.000		
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengembangan Industri dan Perdagangan	Pemantapan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri dan Perdagangan	2 Dok	505.750.000	2 Dok	370.000.000	2 Dok	407.000.000	2 Dok	447.700.000	2 Dok	492.470.000	10 Dok	1.898.050.000		
Penilaian Kecamatan	Terlaksananya Penilaian Kecamatan	0	0	0	0	0	0	289 Kec	1.200.000.000	289 Kec	1.200.000.000	100%	2.400.000.000	Biro Tata Pemerintahan	
Koordinasi dan Penguatan Kerjasama Pemerintah Aceh	Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama pemerintah Aceh	0	0	0	0	100 Peserta - 1 lap	400.000.000	100 Orang - 1 lap	450.000.000	100 Orang - 1 lap	450.000.000	300 Peserta - 3 lap	1.300.000.000		
Persiapan Pelaksanaan Pemilu	Terlaksananya koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilu	3 Kab/Kota	650.000.000	Pileg dan Pilpres	1.750.000.000					Pemilu 24 KDH/WKDH	1.500.000.000	100%	3.900.000.000		
Pembekalan/Sosialisasi bagi Pemilih		0	0	0	0	0	0	0	0	500 Orang	1.000.000.000	100%	1.000.000.000		
Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan	Terlaksananya Rakor bidang kependudukan dan 1 grand strategi kependudukan	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	60 Peserta	200.000.000	300 Peserta	1.000.000.000		
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Meningkatnya Sumber Daya dan peran Ulama		6.442.529.000		2.741.000.000		3.015.100.000		3.316.610.000		3.648.271.000		4.013.098.100		
Koordinasi dan Silaturahmi Ulama -Ulama	Teseleenggaranya sosialisasi hasil muzakarah ulama tahun 2017, Terlaksananya rapat koordinasi sertifikasi haial, Terbinanya hubungan baik umara dan ulama melalui silaturahmi. Dapat terbinanya hubungan Ulama dengan Ulama	100%	100%	6442529000	100%	2741000000	100%	3015100000	100%	3316610000	100%	3648271000	100%	4013098100	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Pemuda dan olahraga		350.315.000												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan	Terlaksananya sinkronisasi pembangunan pendidikan lintas stakeholder	100%	100%	325.410.000	100%		100%		1000%	100%					
Pembinaan dan Peningkatan SDM	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Tentang Standar Sekolah Berasrama (Boarding School) di Aceh	100%	100%	114.905.000	100%		100%		100%	100%					
Program Pembinaan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	Terbinanya Kebudayaan dan Adat Istiadat		747.605.000		1.464.538.500		827.280.850		910.008.935		1.001.009.829		1.101.110.811		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan	Terlaksananya sinkronisasi pembangunan pendidikan lintas stakeholder	100%	100%		400.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000		
Pembinaan Lembaga Pendidikan	Terlaksananya sinkronisasi pembangunan pendidikan lintas stakeholder	100%	100%		312.465.000	100%	343.711.500	100%	378.082.650	100%	415.890.915	100%	457.480.007		

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Drs. DERMAWAN, MM
Pembina Utama
NIP. 19590126 198303 1 005

